

Laporan Tahunan 2006



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

DAFTAR ISI

I. Pengantar	2
II. Pendahuluan	3
III. Indonesia 2006 : Tinjauan isu-isu strategis	5
3.1. Kemiskinan dan Hutang	6
3.2. Kebijakan-kebijakan Perekonomian	11
3.3. Liberalisasi Berlanjut	11
3.4. Korupsi: Masih merupakan Masalah Besar Pembangunan	12
3.5. Isu-Isu Politik: Aceh dan Papua	13
3.6. Bencana Alam : Aceh dan Yogyakarta	16
3.7. Lapindo Brantas: Bisnis Korup, Kolusi dan Nepotisme	17
3.8. Konflik berlanjut di Sulawesi Tengah	19
3.9. Tanggapan-Tanggapan Masyarakat Sipil	21
IV. Kegiatan-kegiatan INFID di tahun 2006	25
V. Kesepakatan dengan Target Advokasi Internasional	28
VI. Kesepakatan dengan Target Advokasi Nasional	31
VII. Pemberdayaan Partisipan	36
VIII. Perkembangan Institusional	37
IX. IPF Dan Pertemuan Tahunan Bank Dunia/IMF2006	38
X. Evaluasi Eksternal	40
XI. Program tahun 2007	41
XII. Catatan Akhir	47

I. PENGANTAR

Pelajaran utama bagi INFID dari tahun 2006 adalah adanya peningkatan tuntutan untuk meningkatkan kualitas produk-produknya. Hal ini terutama berarti perbaikan kapasitas Sekretariat INFID sebagai penggerak utama program-program dan tindakan-tindakan INFID. Perubahan struktur untuk meningkatkan kualitas produknya yang sesuai dengan rekomendasi para pelaku evaluasi eksternal telah memberikan beberapa tantangan bagi staf INFID. Peralihan dari mekanisme kerja berdasarkan team terbukti penting bagi INFID. Perubahan status hukum INFID dari yayasan menjadi asosiasi (perkumpulan) juga didorong oleh kenyataan bahwa para partisipan INFID perlu lebih dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan program INFID

Dari target-target advokasi INFID (pemerintah Indonesia, IFIS dan badan-badan multilateral seperti PBB, CGI dsb.), ada tuntutan agar INFID meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatannya, dengan menyediakan produk-produk yang lebih berkualitas seperti materi-materi yang didasari riset. Kegiatan dengan pemerintah Indonesia bersifat intensif, demikian pula dengan Departemen-departemen Perekonomian, Bank Sentral, Menko Kesra, Departemen Luar Negeri dan Departemen HANKAM.

Konsolidasi para partisipan dan rekanan INFID di Indonesia berlangsung dalam beberapa kegiatan: Konferensi Internasional mengenai Hutang-Hutang Najis (International Conference on Illegitimate Debts), Pertemuan-pertemuan CGI dan International People's Forum (IPF) di Batam. Setiap kegiatan memberikan makna tersendiri bagi kampanye-kampanye INFID dan konsolidasi masyarakat sipil Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan IPF, yang melibatkan ratusan organisasi (internasional, nasional dan lokal), hal tersebut memberikan pengaruh tersendiri secara internasional, nasional dan lokal.

Kami menyampaikan terimakasih pada para partisipan INFID yang telah bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis di tahun 2006. Demikian pula anggota Board yang telah memberikan dukungannya dan yang telah berinisiatif memberikan dukungannya pada saat diperlukan. Kami harus menyampaikan Terima kasih pada Konsorsium Badan-Badan Pemberi Dana INFID/Consortium of Funding Agencies of INFID (EED, Oxfamnovib, ICCO, Ford Foundation, Oxfam Australia, Bread for the World, Development and Peace, 11.11.11 dan HIVOS) yang secara konsisten telah mendukung program-program INFID, Kami juga menyampaikan Terima kasih kami pada jejaring kami: IBON (Reality of Aid), Jubilee South, EURODAD, Afrodad, New Rules-DGPO, NINDJA dan Third World Network.

Jakarta, April 2007



Donatus Klaudius Marut
Direktur Eksekutif

II. PENDAHULUAN

Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi INFID, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, dalam kwartal pertamanya, INFID dipimpin oleh seorang pejabat direktur yang juga merangkap sebagai wakil direktur dan beban kerja tertumpah padanya. Intervensi Dewan Pelaksana melalui supervise dan pengambilalihan beberapa tanggung jawab pejabat direktur merupakan suatu bantuan yang besar. Sewaktu direktur baru mulai mengambil tanggung jawabnya sebagai direktur tidaklah mudah baginya untuk memulainya dengan kecepatan tinggi dan penuh. Ia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan organisasi, para pegawai, mekanisme dan sistem dan dengan tema-tema program-program INFID.

Sementara isu-isu dan tantangan dari luar sebagai arena advokasi INFID terus menjadi tantangan bagi INFID, kebijakan-kebijakan dan pengaruh badan-badan multilateral dalam pihak yang membuat kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi semakin menantang bagi INFID. Pertemuan-pertemuan CGI, misalnya, sebagai target advokasi utama INFID, tidak diumumkan oleh pemerintah dan Bank Dunia. INFID diberitahukan hanya seminggu sebelum pertemuan tahunan CGI. Waktunya tidak cukup untuk memobilisasikan dukungan yang lebih besar dari para partisipan. Walaupun lobi dan makalah mengenai kedudukan (position papers) telah disiapkan, keterlibatan para partisipan INFID dalam advokasi yang berkaitan dengan CGI tidak dapat disiapkan dengan baik. Hal ini khususnya sulit dilakukan karena kelompok-kelompok-kelompok kerja yang dibentuk CGI sejak 2004 yang pada awalnya melibatkan INFID perlahan-lahan menghilang dan kertas-kertas kerja yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok kerja tersebut secara keseluruhan didominasi oleh Bank Dunia.

Kegiatan-kegiatan lobbying sebelum dan selama pertemuan tahunan CGI oleh masing-masing staf INFID (staf program hutang, MDGs dan sektor keamanan) pada akhirnya membuahkan hasil-hasil yang baik. Suara INFID dan para partisipannya yang melakukan mobilisasi diluar gedung konferensi CGI didengar oleh pemerintah Indonesia. Sesudah pertemuan tahunan CGI terdapat serangkaian pertemuan antara pemerintah dan INFID berkaitan dengan CGI. Permasalahan utamanya adalah apakah Indonesia masih membutuhkan CGI. Bila tidak, maka bubarkan saja; tetapi bila masih diperlukan, bentuknya seperti apa.

Forum Masyarakat Internasional/International People's Forum di Batam pada bulan September 2006 merupakan genta pembangkit baik bagi pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia. Media publik dari tingkat internasional, nasional dan lokal meliput kegiatan-kegiatan dan substansi kampanye masyarakat sipil global. IPF menimbulkan debat umum di tingkat nasional yang melibatkan para politikus, akademisi, masyarakat sipil dan pejabat pemerintah. Konferensi tersebut diliput media cetak dan elektronik lokal, nasional dan internasional. Media lokal dari hampir seluruh daerah di Indonesia meliput konferensi tersebut dan hal tersebut membantu penyebaran seluruh informasi mengenai Bank Dunia dan IMF ke seluruh negara. Partisipasi para LSM, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan Indonesia luar biasa. Seorang direktur LSM Jerman yang berbasis di Jakarta mengomentari: "Saya pikir INFID sudah tiada, tiba-tiba ia muncul dengan libasan yang kencang di Batam." Konferensi di Batam telah membangkitkan solidaritas diantara kelompok-kelompok masyarakat sipil dan

kelompok-kelompok komunitas, dan memicu perdebatan diantara para politikus mengenai IMF dan Bank Dunia.

III. INDONESIA 2006: TINJAUAN ISU-ISU STRATEGIS

Apakah persamaan dan perbedaan antara rezim Suharto dan rezim-rezim sesudahnya? Perdebatan dapat timbul mengenai jawaban-jawaban pertanyaan tersebut. Secara sederhana, dari sudut pandang politik ekonomi, persamaannya adalah semuanya mengutamakan kapitalisme global. Perbedaannya adalah saat itu kapitalisme dipimpin birokrasi dan militer, sementara kini pemerintah sebagai suatu keseluruhan menyediakan usaha-usaha yang diperlukan untuk menyenangkan kekuatan kapitalis global. Neoliberalisme yang masih dipertanyakan oleh banyak negara berkembang, bahkan yang telah berhasil memecahkan masalah kemiskinan, dan beberapa negara maju yang mengalami penurunan keamanan kesejahteraan, diakomodasi secara baik dalam kebijakan-kebijakan dan diimplementasikan secara sistematis oleh rejim SBY-Kalla. Janji-janji yang dibuat para partai politik dan Presiden selama masa Pemilu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan alokasi anggaran negara bagi layanan-layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan perempuan dan air dan sanitasi masih berupa janji-janji kosong. Rejim dan politikus di parlemen yang sekarang ini, disibukkan dengan kebijakan-kebijakan untuk menarik investor asing dan untuk menekan masyarakat umum melalui pajak, peraturan perburuhan yang diliberalisasikan, pendaftaran tanah, liberalisasi pasar dan peluasan supermarket yang menggantikan tempat-tempat pasar tradisional. Demokrasi yang diharapkan membawa keadaan yang lebih baik bagi masyarakat tidak dapat melayani masyarakat, karena mekanisme demokrasi dikendalikan oleh mereka yang pro neoliberalisme dan kekuasaan neo liberal.

Dalam suatu jamuan makan siang khusus untuk menyambut Ekonom Utama Bank Dunia di Jakarta pada tanggal 15 September 2006, Menteri Keuangan Indonesia dalam pidatonya berulang kali menyatakan bahwa Indonesia telah mengikuti semua resep dan butir yang dijabarkan dalam Konsensus Washington/Washington Consensus¹. Swastanisasi/privatisasi, liberalisasi, perbaikan sistem perpajakan dan paket-paket investasi untuk menarik para investor asing telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, dan Indonesia telah siap untuk berpartisipasi dalam interaksi perekonomian global dan dalam globalisasi. Pernyataan tersebut secara gamblang mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia pada dasarnya telah menerima dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang akan tidak memungkinkan kaum miskin lepas dari penderitaan dan kesengsaraannya setelah terus menerus didera krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial dalam jangka pendek dan menengah. Pemulihan perekonomian dan kondisi kesejahteraan yang lebih baik hanya akan menjadi impian belaka bagi mayoritas penduduk di Indonesia.

Tinjauan atas undang-undang perburuhan oleh parlemen di tahun 2006 ditentang oleh serikat-serikat dan pergerakan-pergerakan buruh, dan parlemen menghentikan pembahasan tinjauan tersebut dan mengembalikan rancangan tersebut ke pemerintah. Ini merupakan keberhasilan bagi serikat-serikat dan pergerakan-pergerakan buruh. Dari sudut pandang lain, tinjauan undang-undang perburuhan hanya merupakan suatu pengujian oleh pemerintah untuk melihat reaksi masyarakat umum mengenai kebijakan-kebijakan liberalisasi. Dari pengalaman ini, pemerintah akan dapat mengembangkan strategi untuk meloloskan undang-undang yang melancarkan

¹ Washington Consensus sendiri bukan merupakan suatu persetujuan normal tetapi menjadi ideologi para pakar ekonomi dan teknokrat Neoliberal.

peraturan-peraturan yang memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan liberalisasi dimana unsur-unsur dalam paket-paket investasi akan mendapatkan prioritas dan bagaimana mencegah reaksi negatif dari masyarakat.

3.1. Kemiskinan dan Hutang

Krisis ekonomi, institusi-institusi yang tidak benar, korupsi yang mengakar dalam instistusi-institusi pemerintahan dan ketergantungan pada kreditor dan investor asing telah membuat pemerintah Indonesia lemah berkaitan dengan kreditor dan investor asing. Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para kreditor bukannya kepentingan mayoritas penduduk miskin dan tertindas. Kebijakan-kebijakan perekonomian, rancangan-rancangan institusional dan kerangka kerja hukum yang dikembangkan oleh pemerintah yang ada dan yang terdahulu umumnya merupakan implementasi persyaratan yang ditekan oleh badan-badan multilateral (Consultative Group on Indonesia, Bank Dunia, ADB dan IMF). Sampai taraf tertentu, persyaratan-persyaratan tersebut merupakan hukuman bagi pemerintahan yang korup dan lemah, tetapi selebihnya persyaratan-persyaratan tersebut tidak menghargai hak-hak masyarakat yang berdaulat yang telah sekian lama menjadi korban kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintahan yang diktatorial yang didukung kuat oleh badan-badan multilateral yang sama yang kini menekankan persyaratan-persyaratan bagi perubahan untuk kepentingan mereka sendiri.

Privatisasi/swastanisasi layanan-layanan sosial dasar yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, seperti perawatan kesehatan dasar, pendidikan dan air dan sanitasi, telah semakin mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin dan mereka yang hidup di daerah pedesaan dan terpencil. Liberalisasi perdagangan di sektor-sektor dimana para petani

miskin, pedagang kecil dan masyarakat nelayan yang memiliki kapasitas rendah dalam penyediaan barang modal dan peralatan kerja dalam situasi dimana seluruh harga barang-barang tersebut melambung. Pemerintah yang memiliki kewajiban konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan, memenuhi dan melindungi HAM masyarakat secara jelas mengalami kegagalan, sementara institusi-institusi multilateral yang misinya menghapuskan kemiskinan melakukan penyimpangan dari misi mereka.

Sejak ditandatanganinya Deklarasi Tujuan Pembangunan Milenium/Declaration of the Millennium Development Goals (MDGs) pada Pertemuan Puncak Milenium



Terjemahan caption ilustrasi 1: *Dr. Kunibert Raffer, anggota Dewan Pengurus INFID, diundang sebagai pembicara dalam suatu seminar internasional mengenai Hutang dan Pembangunan di Universitas Indonesia, September 2006*

bulan September 2000, dan Pertemuan Puncak MDG's plus 5, seluruh institusi keuangan multilateral dan negara-negara berkembang mendeklarasikan komitmen mereka bagi pengurangan kemiskinan dan perlindungan HAM lainnya. Sebagai salah satu negara yang menandatangani deklarasi tersebut, Indonesia berkewajiban mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan millennium lainnya di tahun 2015.

Pada kenyataannya, bukannya berkurang, jumlah masyarakat miskin di Indonesia dalam enam tahun terakhir justru meningkat. Dari tahun 2003 hingga 2004 kemiskinan cenderung menurun, tetapi kemudian meningkat lagi sejak tahun 2005. Per April 2006, jumlah keseluruhan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah antara 17,7% dari keseluruhan jumlah penduduk (dengan standar pendapatan US\$ 1 per hari). Ini merupakan peningkatan dari 16,66% di tahun 2005. Menurut perhitungan Bank Dunia, berdasarkan pendapatan harian sebesar US\$2, jumlah masyarakat miskin di Indonesia telah mencapai 110 juta dari penduduknya; ini berarti separuh dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang mencapai kira-kira 225 juta. Peningkatan sebesar ini disebabkan oleh sejumlah faktor.

- a. Kebijakan-kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditekankan oleh para kreditor (badan-badan multilateral) yang tidak menjadikan pengurangan kemiskinan sebagai sasaran. Kebijakan-kebijakan tersebut terutama difokuskan pada privatisasi layanan-layanan umum dasar (kesehatan dan pendidikan) perekonomian yang berorientasi pada pasar dan kebijakan moneter; suatu kebijakan perdagangan yang menghapuskan perlindungan bagi bisnis-bisnis kecil dan menengah; kebijakan pemberian harga kompetitif dalam kebutuhan-kebutuhan dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, bahan bakar, dsb.); privatisasi air dan listrik. Masyarakat didorong untuk bersaing dalam pasar kompetitif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atas konsumsi dan barang-barang dan layanan, sementara akses mereka atas kemampuan dasar telah lama terbatas. Daya beli penduduk pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan tidak meningkat sementara harga kebutuhan dasar melonjak secara signifikan.
- b. Alokasi anggaran bagi pembangunan dan layanan sosial sangat kecil dibanding porsi anggaran bagi pembayaran hutang.
- c. Serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia sementara pemerintah tidak mempunyai usaha-usaha yang cukup sistematis dan sesuai bagi manajemen bencana dan program dan kebijakan pemulihan. Epidemii demam berdarah, HIV/AIDS, Polio, TBC, dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan di berbagai bagian Indonesia telah memakan korban jiwa, menyebabkan masyarakat menderita akibat luka-luka, kehilangan tempat tinggal dan kegagalan produk pertanian. Gempa dan tsunami yang terjadi di berbagai propinsi di Sumatra, Nusa Tenggara Timur, Papua, Jawa dan Sulawesi menambah derita yang harus ditanggung masyarakat
- d. Naiknya harga bahan bakar, sebagai implementasi persyaratan IMF dan bagian dari liberalisasi keuangan (fiscal liberalization)
- e. Konflik lokal dan ancaman keamanan atau teror masih terjadi di Papua, Maluku, Sulawesi Tengah dan ledakan-ledakan bom di sejumlah tempat. Hal ini menjadi

ancaman langsung bagi kehidupan komunitas lokal. Masyarakat yang hidup di daerah-daerah konflik tidak dapat berperan serta dalam proses produksi, bahkan bagi kelanjutan hidup mereka sendiri.

Kebijakan pengurangan kemiskinan dapat diimplementasikan bila pemerintah mempunyai komitmen yang kuat dan mempunyai alokasi anggaran yang memadai yang secara khusus ditujukan bagi isu ini. Dalam APBN sejak tahun 1999, sejumlah besar porsi APBN dialokasikan bagi pembayaran hutang, jauh lebih besar dari anggaran yang dialokasikan bagi kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor strategis lainnya.

Kemiskinan tidak dapat dihapuskan bila kebijakan-kebijakan pemerintah hanya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan para kreditor dan untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan pro-pasar. Masyarakat tidak dapat berperan serta dalam mekanisme pasar tanpa dasar perekonomian yang kuat bagi perekonomian rumah tangga mereka sendiri. Ketergantungan akan hutang telah menjadi kanker dalam kebijakan perekonomian nasional Indonesia yang perlahan menghancurkan kemandirian pemerintah dalam membuat kebijakan dan melumpuhkan usaha-usaha perekonomian masyarakat

Hutang-hutang dalam dan luar negeri terus menjadi masalah serius bagi Indonesia. Indonesia telah digolongkan dalam Negara-negara Berpenghasilan Rendah yang Terlilit Hutang/Severely Indebted Low Income Countries (SILIC). Dengan memandang jumlah hutang, beban APBN meningkat sementara sumber-sumber pendapatan pemerintah berkurang berkaitan dengan penjualan mayoritas perusahaan-perusahaan negara, yang sebelumnya menjadi sumber-sumber utama pendapat bagi APBN. Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa hutang Indonesia per 31 Desember 2004 telah mencapai hingga Rp. 1,259 triliun (US\$ 151 milyar) yang terbagi atas: (1) hutang luar negeri: pokok dan bunga Rp 716,4 triliun (US\$ 79,6 miliar), dan (2) hutang dalam negeri: hutang pokok dan bunga Rp 643,6 triliun (US\$ 71,4 miliar). Tahun 2005, keseluruhan hutang adalah US\$ 142,9 miliar yang terdiri atas: (1) hutang luar negeri: US\$72,4 miliar, dan (2) hutang dalam negeri: US\$ 70, 5 miliar. Tahun 2006 jumlah hutang mencapai US\$ 147,2 miliar yang terdiri atas: (1) hutang luar negeri: US\$66,6 miliar, dan (2) hutang dalam negeri: US\$81,6 miliar².

Kecenderungannya adalah penurunan pada hutang luar negeri, sementara hutang dalam negeri meningkat. Hutang dalam negeri terutama berasal dari obligasi negara. Dari perkembangannya, surat obligasi negara juga dibeli oleh perusahaan-perusahaan atau badan-badan asing melalui pasar sekunder. Ini juga berarti akan memberikan kontribusi bagi jumlah hutang luar negeri karena pemerintah akan membayarnya pada badan-badan asing tersebut.

Pendapatan negara yang rendah dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing telah membuat Indonesia mencari lebih banyak pinjaman untuk memelihara program pembangunan; mencari lebih banyak pinjaman telah menjadi penting untuk menutupi defisit dalam anggaran pembangunannya. Situasi yang berupa perangkap

² Hutang luar negeri termasuk hutang pemerintah pusat dan hutang Bank Sentral. Hutang Bank Sentral dari IMF. Pada November 2006, hutang ke IMF dibayar penuh.

hutang ini hanya dapat diakhiri bila Indonesia melakukan negosiasi bagi debt swap dan penghapusan hutang.

Terdapat perkembangan positif dari kebijakan-kebijakan pemerintah, yakni pemerintah telah memutuskan untuk membatasi ambang tertinggi hutang luar negeri. Undang-undang no. 17/2003 mengenai Keuangan Negara menyatakan bahwa (a) defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari PDB/Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Products), dan (b) rasio jumlah hutang keseluruhan terhadap PDB tidak melebihi 60%. Peraturan Pemerintah no. 2/2006 mengenai prosedur peminjaman dan hibah asing juga telah memerinci pengelolaan hutang luar negeri yang lebih baik. Dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (2005 – 2009) pemerintah menyatakan bahwa hutang dalam negeri yang baru per tahun tidak boleh melebihi dari 1% dari PDB dan rasio hutang luar negeri terhadap PDB harus dikurangi hingga mencapai 31% pada tahun 2009.

Pengaturan seoptimis ini masih tidak menunjukkan niat pemerintah untuk menghindari diri dari hutang dan meningkatkan tindakan-tindakan pengurangan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan mengenai pengurangan kemiskinan sebagaimana yang diperlihatkan dalam Makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan/Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) dan rencana-rencana kerja bagi Pencapaian MDGs tidak dapat dijalankan (tidak operasional) dan tidak didukung oleh alokasi anggaran yang lebih baik. Undang-undang mengenai pendidikan yang mengatakan bahwa pemerintah harus mengalokasikan 20% dari RAPBN tahunan bagi pendidikan belum dipenuhi. Anggaran yang dialokasikan bagi tujuan-tujuan lain MDGs masih jauh dibawah persentase tersebut. Pendapatan dalam negeri pemerintah tidak mencukupi untuk mendukung anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai MDGs. Pada tahun 2005 Indonesia dimasukkan dalam kelompok yang “menyimpang atau mengalami kemunduran” dalam pencapaian umum MDGs³.

Inilah dilema bagi Indonesia: membayar hutang atau melakukan pembangunan; mengambil pinjaman baru yang akan membebani masyarakat atau melakukan tindakan langsung menggunakan sumber-sumber yang ada. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan penghapusan yang berkaitan dengan hutang luar negeri, tetapi pemerintah menyetujui untuk melakukan strategi pertukaran hutang (debt swap). Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat mengenai proyek-proyek debt swap sejumlah EUR 93.564.594,06. Namun beberapa departemen tertentu meragukan mekanisme debt swap. Terdapat beberapa alasan seperti mereka tidak menyetujui termin-termin bahwa proyek tersebut yang didanai dengan debt swap harus diaudit oleh auditor indepen karena pemerintah mempunyai auditor umumnya sendiri. Alasan utamanya, sebagaimana terungkap dalam diskusi dengan INFID, adalah debt swap tidak memungkinkan para pejabat pemerintah mendapatkan pendapatan tambahan (berbeda dengan proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman). Hal ini menimbulkan masalah lain berkaitan dengan isu hutang di Indonesia: korupsi.

Pada mulanya APBN tahun 2006 menunjukkan bahwa Indonesia meminjam atau menerima pembayaran sebesar Rp 35,1 triliun atau 1,2% dari keseluruhan anggaran, sementara Indonesia membayar hutang sebesar Rp 63,6 triliun atau 2,1% dari

³ UNESCAP, *A Future Within Reach: Reshaping Institutions in a Region of Disparities to Meet the Millennium Development Goals in Asia and Pacific*, 2005

keseluruhan anggaran. APBN tersebut direvisi. Pendapatan dari hutang baru sebesar Rp 37,6 triliun atau 1,25% sementara pembayaran hutang yang dilakukan pada tahun 2006 berdasarkan APBN yang telah direvisi sebesar Rp 52,8 triliun atau 1,7%.

HUTANG

- Jumlah keseluruhan hutang luar negeri Indonesia US\$ 72,4 triliun pada tahun 2005.
- Pada tahun 2006, jumlah keseluruhan hutang luar negeri US\$ 66,6 triliun
- Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia membayar cicilan pokok hutang dan bunga sebesar Rp 76,6 triliun (Rp 48,6 triliun untuk hutang dalam negeri dan Rp 28 triliun untuk hutang luar negeri). Keseluruhan jumlah cicilan lebih tinggi dari keseluruhan anggaran bagi kesehatan, pendidikan, perumahan dan layanan umum yang hanya sebesar Rp 64,2 triliun.
- Jumlah keseluruhan dana yang digunakan pemerintah Indonesia untuk membayar hutang dalam tahun 2005 walaupun terdapat moratorium dari Paris Club: US\$ 2,215 triliun.
- Rasio hutang terhadap anggaran pendidikan: 2,8
- Rasio hutang terhadap pembelanjaan kesehatan: 10,6
- Rasio hutang terhadap ekspor Indonesia: 161%
- Jumlah keseluruhan pinjaman bagi rekonstruksi pasca tsunami dan gempa: US\$ 500.000.000
- Jumlah keseluruhan hutang yang dibatalkan karena tsunami: 0
- Jumlah keseluruhan hutang bagi proyek-proyek yang rusak oleh tsunami tetapi tidak dibatalkan: US \$218 juta atau Rp 2.18 triliun (85 proyek dari JBIC)
- Kreditor terbesar: Jepang
- Jumlah keseluruhan hutang Indonesia kepada Jepang di tahun 2005: \$29 miliar atau Rp 290 triliun.
- Jumlah keseluruhan hutang Indonesia kepada Jepang terhitung tahun 2006: US\$ 24.474 miliar atau 39,43% dari keseluruhan hutang luar negeri.
- Jumlah keseluruhan hutang yang harus ditanggung oleh masing-masing anak Indonesia: US \$ 811 atau kira-kira Rp 8 juta per anak.

PROFIL KEMISKINAN

- Jumlah keseluruhan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan: tahun 2005:36.377.559 atau 16,66%; tahun 2006 meningkat menjadi 39 juta, atau 17,7%.
- Bila menggunakan US\$ 2 sebagai standar pendapatan bagi garis kemiskinan: terdapat 110 juta orang miskin di Indonesia atau 53% dari seluruh penduduk Indonesia
- Dari sudut pandang Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index, dari 177 negara Indonesia menduduki tempat ke 111 (2005). Tahun 2006 dapat lebih rendah dari itu.
- Jarak waktu dimana seorang ibu meninggal saat melahirkan: 3 menit
- Jumlah keseluruhan balita yang menurut UNICEF akan mengalami pertumbuhan abnormal yang disebabkan oleh kemiskinan sejak krisis ekonomi pada tahun 1998: 2-3 juta
- Jumlah keseluruhan balita yang menderita gizi buruk pada tahun 2005: 1,8 juta; tahun 2006 meningkat menjadi 2,3 juta anak. Terdapat 5 juta anak balita yang hidup dialam keadaan kekurangan gizi di tahun 2006.
- Persentase anak-anak kurang gizi, menurut WHO, terdapat 30% yang dikategorikan “berada dalam situasi darurat”.
- Rasio kematian bayi pada saat lahir 37 per 1000; separuhnya disebabkan oleh gizi buruk.
- Jumlah keseluruhan anak yang meninggal karena kelaparan di tahun 2005: 47; di tahun 2006 dapat meningkat berkaitan dengan berkurangnya daya beli masing-masing rumah tangga
- Proporsi siswa yang dapat menamatkan pendidikan dasar 9 tahun: 46,8%
- Jumlah keseluruhan penduduk yang mempunyai akses terhadap air bersih: 100 juta (41,3%)
- Persentase penduduk perkotaan yang memiliki akses terhadap air bersih: 18%
- Penduduk yang hidup dengan AIDS: 90.000- 130.000 orang
- Jumlah keseluruhan penduduk pedesaan yang tidak memiliki tanah, hidup di sekitar atau dalam hutan: 10 juta
- Jumlah total sekolah dasar yang tidak memiliki fasilitas yang mencukupi: 471.050 (57,67%)
- Putus sekolah di tahun 2004: 767.835
- Persentase anak perempuan yang butahuruf: 79,6%
- Persentase bergizi buruk di NTT: 31,22%

3.2. Kebijakan-kebijakan perekonomian

Tahun 2006 merupakan suatu perayaan bagi kelompok neo-liberal di Indonesia. Penyusunan ulang (reshuffle) Kabinet pada bulan Desember 2005 dan mulai bekerja di tahun 2006 memberikan kedudukan kuat bagi orang-orang yang bersahabat dengan Bank Dunia, IMF dan WTO. Seluruh posisi perekonomian (Menko Perekonomian, Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan) semua berasal dari sekolah ekonomi yang sama dan berlatar belakang sama, dalam hal ini mereka adalah konsultan atau staf di Bank Dunia atau IMF. Semua menteri perekonomian dan team pakar mereka adalah penganut sejati dari “Washington Consensus”.

Team ekonomi Kabinet tersebut memperlancar agenda liberalisasi pemerintah, walaupun selama pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan bersikap pro rakyat dan agenda pembangunan yang berpihak pada kaum miskin. Pernyataan pemerintah bahwa program-program dalam pembangunan perekonomian selalu pada jalurnya terbukti hanya merupakan kebohongan saat di tahun 2006 terungkap bahwa tingkat kemiskinan meningkat dari 15% di tahun 2005 menjadi 17,7% di tahun 2006. Perdebatan mengenai angka dan tingkat kemiskinan memberikan bukti lain bagaimana kebijakan-kebijakan perekonomian pemerintahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, tidak bekerja dengan baik atau tidak berada pada jalurnya.

Pemerintah membuat alasan-alasan/penjelasan dan didukung oleh Bank Dunia di Indonesia mengenai fakta-fakta baru atas kemiskinan. Alasan utamanya adalah kenaikan harga beras dan bencana alam di beberapa tempat. Ini semua hanya alasan-alasan saja. Penjelasan utamanya, yang telah dicoba ditutupi oleh pemerintah dan juga Bank Dunia, adalah kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 120%. Kenaikan tersebut memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan konsumsi dan harga bahan utama di segala bidang, terutama sektor rumah tangga. Penekanan akan kenaikan harga beras yang dikembangkan oleh Bank Dunia dimaksudkan untuk memaksa pemerintah melakukan impor beras. Sementara pada kenyataannya produksi beras di Indonesia menurun di tahun 2006 karena meningkatnya biaya produksi yang berkaitan dengan kenaikan harga pupuk dan pestisida. Kenaikan harga pupuk dan pestisida disebabkan oleh adanya pemotongan subsidi pupuk dan pestisida bagi para petani dan oleh kenaikan harga BBM.

Tahun 2006 dipandang sebagai puncak keberhasilan dalam sejarah keberadaan Bank Dunia di Indonesia. Bank Dunia telah berhasil memaksa pemerintah Indonesia terbuka selebar mungkin terhadap pasar global dan memaksa pemerintah lebih bersahabat dengan kekuatan pasar global. Rekomendasi-rekomendasi Bank Dunia sehubungan dengan rancangan kebijakan bagi Indonesia telah sepenuhnya diakomodasi oleh pemerintah.

3.3 Liberalisasi Berlanjut

Sejak tahun 2004 pemerintah, CGI dan IFIs telah mencoba memperkenalkan dan mengimplementasikan paket baru standar investasi. Paket investasi tersebut mencakup undang-undang mengenai investasi, undang-undang perburuhan, undang-undang pertanahan, undang-undang privatisasi dan kebijakan-kebijakan mengenai infrastruktur. Awal 2006 parlemen mendiskusikan tinjauan undang-undang perburuhan yang diajukan pemerintah. Tinjauan atas undang-undang perburuhan

yang ada dimaksudkan untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut lebih memihak pada para investor asing dan membatasi kebebasan organisasi-organisasi buruh. Revisi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kebebasan bagi para investor asing dan buruh internasional.

Revisi tersebut ditentang oleh organisasi-organisasi buruh. Organisasi-organisasi tersebut dan masyarakat sipil di Indonesia memobilisasi demonstrasi-demonstrasi menentang peninjauan atas undang-undang perburuhan yang ada. Perlawanan organisasi buruh tersebut berhasil dalam artian parlemen menghentikan proses peninjauan undang-undang perburuhan dan meminta pemerintah untuk menariknya kembali. Pemerintah kini tengah mempersiapkan revisi-revisi baru dan akan mendiskusikannya dengan para perwakilan organisasi buruh.

Undang-undang penanaman modal (investasi) yang berulang kali disinggung oleh pemerintah belum dirancang dan parlemen juga tidak secara proaktif melakukan pendekatan kepada pemerintah mengenai hal ini, walaupun pemerintah secara jelas mengatakan bahwa undang-undang baru sangat dibutuhkan. Rancangan undang-undang yang ada merupakan rancangan yang dibuat oleh ADB dan Bank Dunia tetapi tidak diumumkan ke masyarakat umum. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak mengetahui apakah mereka bertanggung jawab atas perancangan undang-undang penanaman modal yang baru. Organisasi-organisasi masyarakat sipil memperkirakan bahwa undang-undang penanaman modal yang baru dapat menjadi pintu masuk bagi semua undang-undang lain yang meliberalisasikan perekonomian Indonesia. Karenanya pemerintah sangat berhati-hati dan berusaha untuk tidak terekspos ke khalayak umum untuk mencegah hal serupa yang terjadi dengan undang-undang perburuhan.

Pemerintah melakukan Pertemuan Puncak Infrastruktur ke dua. Pertemuan puncak yang pertama yang diadakan tahun 2004 ditanggapi positif oleh para pelaku pasar asing. Tetapi tanggapan tersebut tidak diikuti oleh penanaman modal yang nyata. Masalah utamanya adalah para penanam modal asing tersebut masih mencemaskan kepastian politis atas investasi. Pertemuan puncak infrastruktur yang ke dua dimaksudkan untuk memastikan bahwa para investor memberikan komitmen nyata untuk melakukan investasi di Indonesia. Hasilnya para investor tertarik untuk menanam modal di Indonesia tetapi baru akan bergerak bila perundang-undangannya memberikan jaminan atas kepastian dan keamanan investasi mereka.

3.4 Korupsi: Masih merupakan Masalah Besar Pembangunan

Pemerintah yang sekarang memprioritaskan serangan atas korupsi. Korupsi dipandang sebagai hambatan utama bagi pembangunan di Indonesia. Sewaktu Presiden Susilo Bambang Yudoyono meluncurkan program kegiatan memberantas korupsi dengan mendirikan Komisi Nasional bagi Pemberantasan Korupsi, masyarakat memberikan harapan tinggi pada pemerintah.

Terdapat tindakan-tindakan yang jelas atas pemberantasan korupsi. Para pejabat tinggi hingga yang terendah rendah yang korup di pemerintahan menjadi sasaran operasi pemberantasan korupsi. Para mantan menteri, gubernur, walikota, jenderal TNI, pejabat polisi, hakim, jaksa, cendekiawan, diplomat, pelaku bisnis dan birokrat yang terlibat korupsi ditangkap dan beberapa diantaranya dipenjarakan. Walaupun

Undang-Undang Pemerintahan Aceh – UUPA diakhiri dengan hasil-hasil yang luar biasa. Undang-undang baru memberikan lebih banyak kebebasan bagi pemerintah Aceh untuk mengelola proses ekonomi dan politik mereka sendiri. Undang-undang baru ditanggapi secara positif oleh masyarakat di Aceh,



walaupun beberapa mengharapkan lebih banyak kebebasan. Dengan undang-undang baru tersebut pemerintah Aceh akan dapat mengimplementasikan otonomi khusus dan masyarakat Aceh lebih bebas dari campur tangan pemerintah nasional.

Harapan bahwa undang-undang tersebut mengakomodasi calon-calon independent dalam pemilihan gubernur dan bupati telah dipenuhi dengan undang-undang ini. Tetapi harapan akan masyarakat Aceh diperkenankan mendirikan partai politik lokal mereka sendiri masih belum akan diakui dan direalisasikan dalam waktu dekat. Masih ada kemungkinan masyarakat di Aceh dapat mempunyai partai-partai politik lokal. Perdamaian dan ruang politik yang lebih bebas bagi masyarakat Aceh telah memberikan kesempatan pada masyarakat Aceh, baik masyarakat biasa maupun mantan penentang, untuk memulai kehidupan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Diharapkan situasi tersebut akan berlanjut dan perdamaian akan dapat bertahan.

Papua masih merupakan daerah rawan konflik dan pelanggaran HAM. Bulan Februari dan Maret 2006 serangkaian tindakan yang menimbulkan konflik dan pelanggaran terhadap masyarakat lokal Papua terjadi di Timika dan Abepura. Kasus tersebut dimulai dengan pemaksaan pelarangan oleh satuan pengamanan PT Freeport Indonesia terhadap kegiatan-kegiatan penambangan tradisional oleh masyarakat lokal Papua di sungai Aghawogong yang terletak di daerah konsesi PT Freeport. Konflik tersebut memuncak yang mengakibatkan beberapa korban baik di pihak masyarakat lokal Papua maupun satuan pengamanan. Konflik menyebar ke Abepura saat mahasiswa dan kaum pemuda di kota pelajar ini menanggapi kasus Timika dengan menuntut tindakan politis DPRD, MRP dan pemerintah propinsi Papua. Demonstrasi mahasiswa dan kaum pemuda di Abepura mengakibatkan beberapa korban (terluka dan meninggal) di pihak kepolisian, militer, mahasiswa dan kaum pemuda (bahkan murid sekolah menengah atas).

Liputan media nasional atas kasus Abepura menunjukkan dengan jelas bagaimana media dikendalikan oleh polisi, militer dan masyarakat bisnis. Media nasional menunjukkan pada masyarakat bagaimana kasarnya masyarakat Papua dan bahwa mereka tidak menghargai manusia lain dari daerah-daerah Indonesia lainnya. Semua saluran televisi berulang kali menayangkan gambar-gambar orang Papua memukul polisi dan militer Indonesia. Tayangan tersebut dihentikan saat seorang pemirsa wanita menghubungi salah satu stasiun televisi untuk menghentikan penayangan gambar-gambar tersebut dengan pertimbangan sudut pandang pendidikan dan etis bagi anak-anak. Tak satupun dari media (televisi dan koran) menunjukkan kekasaran

tindakan polisi dan militer terhadap kaum pemuda Papua. Korban-korban di pihak kaum pemuda Papua tidak diperlihatkan oleh media nasional.

Kasus Abepura merupakan suatu titik dimana masyarakat Papua dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Media massa dan pernyataan-pernyataan resmi dari pejabat pemerintah mencoba memobilisasi dukungan emosional dari masyarakat Indonesia lainnya untuk mendukung perang melawan masyarakat Papua yang berusaha berjuang bagi kemerdekaannya. Pada kenyataannya kasus Abepura tidak ada kaitannya dengan sentimen untuk kemerdekaan sama sekali. Hal ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan masyarakat lokal Papua yang berjuang meningkatkan pendapatan untuk kelangsungan hidup mereka di Timika karena sumber-sumber penghidupan utama mereka (rawa untuk perkebunan sagu dan hutan untuk berburu) telah diambil alih oleh PT Freeport dan mereka dipaksa mencari sumber-sumber penghidupan alternatif. Walaupun ada tuntutan-tuntutan agar PT Freeport ditutup karena operasinya yang merusak dan kontribusinya yang kecil bagi kesejahteraan komunitas lokal, ini hanyalah tuntutan-tuntutan yang diulang sejak jaman Suharto.

Kasus HAM ini belum terselesaikan. Ada 33 orang Papua yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan di Jayapura. Masyarakat lokal Papua dituduh sebagai sumber permasalahan, sementara tokoh-tokoh utama (polisi, militer dan PT Freeport) bebas. Sesungguhnya kasus ini tidak dapat dipisahkan dari konflik kepentingan antara polisi dan militer terkait dengan bisnis keamanan PT Freeport. Sejak lama militer dibayar PT Freeport untuk menjaga keamanan operasi penambangan perusahaan tersebut. Sejak tahun 2006 tanggung jawab keamanan dialihkan ke polisi sebagai bagian dari strategi nasional untuk mencegah militer dari bisnis keamanan.

Sebagai kompensasi bagi pihak militer, Papua sebagai bagian depan jajaran batas-batas negara akan menjadi salah satu konsentrasi penugasan militer. Ini akan menjadi babak baru pelanggaran terhadap masyarakat Papua. Kampanye Papua Tanah Damai dilanjutkan dengan dukungan organisasi-organisasi keagamaan, para pemimpin adat dan kelompok masyarakat sipil di Papua, seluruh bangsa dan pada level internasional.

Perkembangan baru di Papua adalah munculnya tokoh-tokoh baru (atau tokoh-tokoh yang diperbaharui) dalam bisnis eksploitasi sumber-sumber daya alam. Pertambangan utama dan paling kontroversial Freeport akan terus berlanjut dan akan menjadi kontroversi politik di tahun-tahun mendatang, menimbang Freeport juga merupakan obyek perjuangan diantara kekuatan-kekuatan politik di tingkat Jakarta. Partai-partai politik besar telah mempersiapkan strategi-strategi baru untuk mendapatkan dukungan pendanaan bagi masing-masing partai politik.

Sesungguhnya Papua telah dibagi dalam konsesi-konsesi bisnis bagi operasi penambangan, penebangan, perkebunan dan perikanan, dan kebanyakan dari para pemilik bisnis tersebut berasal dari Jakarta. Hambatan utama bagi operasi bisnis di masa mendatang adalah kenyataan bahwa sumber-sumber daya alam (tanah dan hutan) dimiliki atau setidaknya diakui sebagai milik oleh masyarakat tradisional Papua. Di masa lalu, dan sekarang masih berlanjut, hak-hak masyarakat Papua atas kepemilikan tersebut telah dilanggar. Dalam skenario investasi baru di Papua, para konglomerat yang berbasis di Jakarta dan rekanan internasional mereka tengah mencoba menghindari tuduhan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Strategi baru untuk menutupi keterlibatan kelompok elit Jakarta dalam pelanggaran HAM adalah dengan menimbulkan konflik horisontal antar kelompok-kelompok kesukuan di Papua. Bila

masyarakat Papua tidak memberikan perhatian serius atas strategi ini, pelanggaran tersebut akan beralih dari pihak militer dan polisi atas masyarakat Papua menjadi oleh masyarakat Papua atas masyarakat Papua sendiri.

Di tahun 2004 – 2005 INFID beserta partner-partner dan jejaringnya melakukan riset mengenai penebangan kayu liar di Indonesia, termasuk di Papua. Laporan riset tersebut dipresentasikan dalam pertemuan CGI di tahun 2005 dan pertemuan PBB tahun 2005 yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Para anggota CGI menolak menganggap penebangan kayu liar sebagai suatu tindakan kejahatan lintas bangsa/transnasional, tetapi pemerintah Indonesia bersama INFID dan para partnernya mencoba membawa isu tersebut dalam PBB. Walaupun ditolak, riset tersebut dilanjutkan oleh pemerintah dengan meluncurkan kampanye melawan penebangan liar. Tahun 2006 pemerintah menahan para polisi di Papua yang diduga terlibat dalam penebangan liar dan mengadili mereka. Walaupun peradilan tersebut dihentikan, kasus tersebut memicu pengawasan ketat dari pemerintah.

3.6 Bencana Alam: Aceh dan Yogyakarta

Bulan Desember 2006 pemerintah dan badan-badan multilateral merayakan tahun ke dua rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dengan apresiasi besar. BRR menerima penghargaan tinggi atas pencapaiannya. Multidonor Trust Fund yang mengelola bantuan hibah dari donor-donor resmi mengatakan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sebagai implementasi Deklarasi Paris yang sebenarnya mengenai harmonisasi diantara para donor dan pemerintah penerima bantuan, kepemilikan program oleh masyarakat Aceh, kesejajaran dengan kebijakan nasional dan program yang berorientasi pada hasilnya.



Walaupun berhasil dalam memobilisasi dukungan global, masih terdapat kritik keras mengenai perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh, dari masalah korupsi, implementasi program yang tertunda, kualitas, hingga “siapa yang sesungguhnya

mendapat keuntungan dari rekonstruksi dan rehabilitasi.” Permintaan kelompok masyarakat sipil Aceh agar INFID memberikan perhatian khusus pada pengimplementasian program-program yang menggunakan dana multi-donor trust harus ditanggapi. INFID akan memberikan perhatian khusus mengenai masalah ini pada tahun 2007.

Tahun 2006 Indonesia kembali diterpa gempa bumi yang menimpa Yogyakarta dan bagian-bagian selatan Jawa Tengah. Bencana terjadi sebulan sebelum pertemuan CGI bulan Juni 2006. Bank Dunia, ADB dan pemerintah Indonesia melakukan penilaian

cepat untuk memperkirakan kerugian dan kerusakan akibat bencana dan mempersiapkan proposal bagi pertemuan CGI. Tetapi masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah telah belajar dari daerah-daerah bencana lainnya bahwa pinjaman bagi rekonstruksi tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat dan hanya akan bagi badan-badan bisnis besar di Jakarta. LSM-LSM setempat dan organisasi-organisasi masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan kampanye “Pemulihan tanpa Hutang.” Kampanye ini diluncurkan saat para delegasi CGI mengunjungi Yogyakarta dan Jawa Tengah sehari setelah Pertemuan CGI di Jakarta. Rekonstruksi dan rehabilitasi Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan jelas menunjukkan kelambatan pemerintah dalam menanggapi bencana tersebut. Kebaikan komunitas di Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah mereka sangat bergantung pada komunitas mereka sendiri untuk mengatasi bencana tersebut. LSM-LSM setempat, nasional dan internasional bersama-sama mendukung komunitas setempat.

Bulan September 2006 gempa dan tsunami menimpa pantai selatan Jawa Barat dan Tengah yang merusakkan ratusan rumah dan peralatan komunitas nelayan. Ratusan orang meninggal atau hilang karena tsunami, dan beberapa bangunan separuh atau sepenuhnya rusak.

INFID mengumpulkan sejumlah dana untuk mendukung para partnernya (melalui Forum LSM Yogyakarta) dan Asosiasi Petani (Farmers Associations) di Jawa Barat sebagai ungkapan solidaritas. Di kebanyakan tempat INFID memberikan dukungan bagi advokasi. Target advokasi ada dua: menolak hutang bagi rekonstruksi dan rehabilitasi, dan mengajukan tuntutan hukum bagi kelambatan tanggapan pemerintah. Kampanye menentang hutang bagi pemulihan dilakukan bersama dengan para partner setempat dan nasional.

3.7 Lapindo Brantas: bisnis korup, kolusi dan nepotisme

Hanya dua hari sesudah gempa di Yogya dan Jawa Tengah, suatu situs penambangan di Jawa Timur meledak dan memulai bencana lain berupa luapan lumpur di Jawa Timur.



Penambangan

tersebut dijalankan oleh PT Lapindo Brantas, yang dimiliki bersama oleh tiga konglomerat utama nasional yang juga memegang kekuasaan di Jakarta, dan suatu perusahaan penambangan dari Australia (Santos). Ketiga konglomerat ini dijuluki BBM⁴ (*Bukaka* dimiliki oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, *Bakrie* dimiliki oleh

⁴ BBM merupakan kependekan Bahan Bakar Minyak. Naiknya harga minyak di Indonesia merupakan persyaratan yang diberikan IMF dalam Letter of Intent yang ditandatangani Suharto tahun 1998 dan diperbaharui setiap tahun oleh Presiden-presiden sesudah Suharto hingga Megawati Sukarnoputri. Kenaikan harga BBM juga memberikan lebih banyak keuntungan pada perusahaan-perusahaan yang

keluarga dari Aburizal Bakrie, Menko Kesra, dan *Medco Group* suatu perusahaan milik seorang politisi PDIP dan keluarga-keluarga yang berkaitan dengan Suharto).

Ribuan orang terpaksa meninggalkan kediaman mereka sejak 29 Mei. Sejak saat itu perkampungan tenggelam, lahan pertanian hancur, pabrik dan sekolah tutup dan sumber-sumber penghidupan masyarakat hilang. Infrastruktur disekitar daerah tersebut juga rusak dan mengacaukan transportasi barang dan masyarakat dari dan ke Surabaya dari arah Selatan. Pipa saluran gas rusak dan menyebabkan kerugian milyaran Rupiah bagi PLN dan Perusahaan Gas Negara. Kehidupan disekitar daerah-daerah lumpur hampir sepenuhnya terganggu.

Bencana tersebut terutama disebabkan oleh kesalahan manusia. Sumur eksplorasi gas Lapindo Brantas Banjar Panji I telah mencapai kedalaman lebih dari 3.000 meter ketika luapan lumpur timbul. Polisi yang menginvestigasi penyebab bencana tersebut mengatakan bahwa pipa sumur pecah dan perusahaan tersebut gagal menutup lubang tersebut dengan benar. Para pakar mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memasang penyelubung di sekitar sumur tersebut sesuai dengan level yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan pertambangan Indonesia.

Akibat luapan lumpur tersebut parah dan langsung, termasuk efek-efek penyebaran *hydrogren sulphine* yang mengandung gas beracun dan penyebaran penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usus. Pada awal Agustus 2006 terdapat 1.500 orang dirawat di Rumah Sakit karena gas beracun dan diare.

Luapan lumpur masih terus terjadi, namun pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang terkena imbas telah dialihkan ke tangan pemerintah dan bukan ditangani perusahaan tersebut. Bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia ini sekarang menjadi suatu skandal politik. Mereka yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut mempunyai pengaruh politik yang besar baik di Parlemen maupun di badan Eksekutif. Tekanan dari komunitas-komunitas setempat dan LSM-LSM pada Parlemen dan pemerintah Indonesia tampaknya sia-sia, karena partai-partai politik besar di Parlemen (Golkar dan PDIP) berkaitan erat dengan para pemilik perusahaan tersebut. Grup Bukaka dimiliki oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pengurus Partai Golkar dengan suara dominan di Parlemen; Bakrie Brothers (holding company bagi Lapindo Brantas) dimiliki oleh keluarga Bakrie, keluarga menko Kesra yang juga pengurus Partai Golkar; Medco Group dimiliki oleh keluarga Arifin Panigoro; Arifin Panigoro adalah pengurus PDIP (partai politik terbesar ke dua di Parlemen) dan berhubungan erat dengan keluarga Suharto. Walaupun Arifin Panigoro dari PDIP (partai oposisi di Parlemen), partai politik tersebut tidak dapat berbuat apa-apa mengenai bencana tersebut mengingat Arifin Panigoro juga penyumbang besar bagi keuangan partai tersebut.

Melalui sudut pandang politik ekonomi, bencana luapan lumpur tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa Jawa Timur kaya akan sumber daya pertambangan: gas alam dan minyak. Cadangan minyak dan gas meluas dari daratan Jawa Timur hingga bagian utara Bali, baik di daratan maupun lepas pantai. Perusahaan-

bergerak di bisnis minyak dan gas. Kelompok-kelompok bisnis yang disebutkan di atas merupakan tiga diantara perusahaan-perusahaan terbesar yang mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak, Karenanya BBM kemudian menjadi kependekan Bukaka, Bakrie and Medco untuk menyatakan ketiga konglomerat ini yang berkembang karena favoritisme politik sejak jaman Suharto.

perusahaan multinasional seperti Exxon Mobil (AS), Santos (Australia), dan Petrochina (Cina); Monsanto (AS) di bidang pertanian dan Philips Morris di bidang perkebunan tembakau telah menanamkan kakinya dengan kuat di daerah-daerah tersebut. Begitu pemerintah mengambil keputusan yang salah berkaitan dengan Lapindo Brantas, hal tersebut juga dapat berakibat pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Bakrie Group berhubungan erat dengan Exxon Mobil dan Medco Group dengan Santos.

Bencana tersebut terjadi saat masyarakat di Jawa Timur telah terfragmentasi secara politis dan sosial. Beberapa kasus yang terjadi sebelum bencana memberikan kontribusi pada lemahnya posisi politik dan tawar menawar komunitas setempat di Jawa Timur. Sewaktu Exxon Mobil mengambil alih lahan-lahan di Cepu (Jawa Timur) untuk eksploitasi minyak dan gas, tidak ada penolakan dari komunitas-komunitas setempat. Sewaktu Monsanto mengambil alih 250 ribu hektar tanah dari masyarakat bagi pertanian jagung dan kedelai GMO, para petani tidak memberikan penolakan. Bahkan saat afiliasi bisnis Monsanto mengajukan seorang petani ke pengadilan atas dakwaan memalsukan bibit GMO, kelompok-kelompok petani di Jawa terfragmentasi. Komunitas setempat telah kehilangan kesatuan dan kepemimpinan setempat. Sebaliknya masyarakat hanya dimobilisasi ke dalam konflik kaum elits (konflik dalam pemilihan umum daerah).

Riset Don Marut di tahun 1999 mengenai pembunuhan 248 pemimpin Islam setempat di Jawa Timur yang secara umum dikenal sebagai “pertempuran antar para penganut ilmu hitam” mendapatkan bahwa pembunuhan para pemimpin keagamaan setempat dimaksudkan untuk melumpuhkan kesatuan komunitas di Jawa Timur. Begitu kesatuan komunitas tersebut pecah, lebih mudah bagi kekuatan eksternal untuk mengalahkan komunitas lokal, termasuk mengambil alih lahan-lahan yang mengandung berlimpah sumber daya alam.⁵ Riset lain mengenai pembunuhan tersebut dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang menyimpulkan bahwa pembunuhan-pembunuhan tersebut dimaksudkan untuk melumpuhkan pendukung panatis Abdurrahman Wahid (yang menjadi calon terkuat untuk kepresidenan melawan Habibie). Riset lainnya oleh Lakpesdam NU melaporkan bahwa hal tersebut dipicu oleh konflik antara penganut modernisasi dan penganut tradisionalisme. Apapun kesimpulan riset-riset tersebut, faktanya adalah masyarakat di Sidoarjo, Jawa Timur, telah kehilangan pemimpin-pemimpin mereka dalam mengorganisir dan membela tuntutan-tuntutan dan hak-hak mereka. Yang mencemaskan adalah hal ini akan terjadi di daerah-daerah lain di Jawa Timur. Perlahan-lahan masyarakat di Jawa Timur akan dipindahkan dari tanah milik mereka sendiri karena tanah mereka akan diambil alih oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan konglomerat nasional.

3.8 Konflik berlanjut di Sulawesi Tengah

Tahun 2006 adalah puncak konflik di Sulawesi Tengah sewaktu menjadi jelas bahwa konflik-konflik di Sulawesi Tengah tidak dapat dilihat semata-mata sebagai konflik

⁵ Don K. Marut, “Globalization and Conflicts among the Poor in Indonesia”, makalah yang dipresentasikan di Conference of Groenlinks Partij, Groningen, Belanda, Oktober 2003, dan dipresentasikan sebagai makalah latar belakang bagi pelatihan manajer pengembangan komunitas YAKKUM dan CD Bethesda Yogyakarta tahun 2005.

antar agama. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah percaya bahwa pelaksanaan hukuman mati atas ke tiga petani migrant (Tibo dkk) akan menyelesaikan konflik di Sulawesi Tengah. Ketiga petani malang ini dituduh sebagai dalang dan pelaku pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum Muslim di Poso yang memicu kelanjutan konflik. Konfliknya masih terus berlanjut bahkan lebih keras.

Riset-riset oleh banyak kelompok perlahan-lahan mengungkapkan bahwa konflik-konflik tersebut berkaitan dengan rencana-rencana eksploitasi sumber-sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur besar untuk mendukung investasi dalam eksploitasi sumber-sumber daya alam. Konflik-konflik tersebut kemudian diperumit sewaktu kelompok elit politik dan militer dan polisi setempat mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut. Korupsi pada program sosial bagi pemulihan, dan bisnis keamanan oleh militer dan polisi menjadi alasan lain mengapa konflik-konflik berlanut. Situasi tersebut juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan daerah-daerah konflik sebagai medan pelatihan militer bagi kelompok-kelompok teroris yang baru direkrut.

Dalam analisa mereka yang akrab dengan kelompok cendekiawan dan militer dan fundamentalis, semua kelompok (para pejabat yang korup, kelompok-kelompok teroris) digunakan oleh pihak militer untuk menjaga bisnis keamanan mereka. Analisa lain mengatakan bahwa konflik-konflik tersebut terkait erat dengan ekspansi dan rencana-rencana perusahaan-perusahaan multinasional besar dan para konglomerat nasional untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di daerah-daerah tersebut, menggunakan militer, polisi dan kelompok-kelompok milisi untuk membersihkan daerah-daerah tersebut dari pendudukan komunitas tradisional setempat.⁶ Sedikitnya terdapat empat perusahaan multinasional berskala besar beroperasi di daerah-daerah tersebut: INCO (Kanada) dan Mitsui (Jepang), Exxon Mobil (AS), Rio Tinto (Australia/Inggris). Sementara konglomerat nasional termasuk: Artha Graha Group yang dimiliki oleh Tomy Winata dan para pensiunan jenderal, Bukaka, Bakrie, Medco, dan lain-lainnya. Para konglomerat nasional tersebut juga bersaing di daerah tersebut: TWA vs BBM (kelompok Tomy Winata yang mewakili masyarakat bisnis Cina melawan Bukaka, Bakrie dan Medco mewakili kelompok-kelompok Indonesia) atau Harimau lawan Naga.

Konflik-konflik tersebut hanya bisa dihentikan bila: (1) perusahaan-perusahaan menghentikan pendanaan para pelaksana konflik (kelompok-kelompok militer dan fundamentalis); (2) pemerintah menangkap para pejabat yang korup; (3) pemerintah menghentikan campur tangan militer di daerah-daerah konflik dan (4) pengakuan hak kepemilikan masyarakat setempat atas tanah dan hutan. Konflik-konflik bertahan karena para pendukung terus mendanai pelaksana konflik; para pejabat yang korup bebas menutupi kekorupan mereka dengan menciptakan pemberontakan-pemberontakan; militer masih dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis dalam konflik tersebut dan masyarakat setempat hidup dalam keadaan berbahaya karena hak milik mereka diambil alih tanpa kompensasi.

⁶ Lihat George Junus Aditjondro, "Meraih Berkah, Mengusir Laknat: People's Empowerment in anticipating the Flooding Development in the 'Waist' of Sulawesi", makalah yang dipresentasikan di Institut Kristen Negara Toraja/State Christian Institute of Toraja, 7 Oktober 2006. Lihat juga George Junus Aditjondro, "Dinamika Politik dan Modal di Sulawesi", makalah tidak diterbitkan, 2006.

6.9 Tanggapan-tanggapan dari Masyarakat Sipil

Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah sangat proaktif dalam melakukan advokasi bagi perubahan kebijakan dan pembelaan HAM, dan dalam memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi, bencana-bencana alam dan konflik. Walaupun kapasitasnya terbatas karena keterbatasan sumber, organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia masih dapat mengembangkan jejaring dan aksi-aksi bersama untuk memberikan solusi dan mendorong pemerintah bagi perubahan yang sistematis.

a. Jejaring Advokasi:

Kelompok-kelompok organisasi masyarakat sosial yang menangani kebijakan-kebijakan telah secara langsung dan tidak langsung melibatkan diri dengan proses pembuatan kebijakan: Indonesian Corruption Watch (ICW), INFID, Walhi, Elsam, KontraS, Imparsial, YLBHI, PBHI dsb. bersama dengan jejaringnya di tingkat nasional dan regional mencoba memberikan tanggapan-tanggapan yang sesuai dengan sesuai dengan keadaannya baik melalui advokasi bagi perubahan kebijakan maupun melalui aksi-aksi langsung (dalam hal ini aksi-aksi solidaritas). INFID dan Walhi bekerja sama pada advokasi bagi proyek-proyek Bank Dunia dan ADB dengan strategi yang berbeda: INFID menggunakan strategi pertemuan (*engagement strategy*), sementara Walhi menggunakan *non-engagement strategy*. KontraS, Imparsial, HRWG dan PBHI memimpin dalam advokasi HAM dari tingkat lokal hingga internasional. Elsam memimpin dalam riset dan advokasi mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan bertemu langsung dengan Komnas HAM. ICW semakin tajam dalam riset dan analisisnya demikian pula dalam pernyataan-pernyataan kebijakan mengenai korupsi.

INFID, KontraS, Imparsial, HRWG dan YLBHI mengembangkan program bersama mengenai reformasi sektor keamanan: riset dan pelatihan reguler bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi ini dengan jejaring mereka secara bersama-sama di tingkat regional berurusan dan mendorong reformasi dalam anggaran militer, keamanan dan transparansi dalam kebijakan-kebijakan dan anggaran militer dan polisi.

LSM-LSM yang bekerja pada isu-isu perkotaan, seperti Uplink dan FAKTA (Forum Warga Kota) secara aktif melakukan advokasi bagi kaum miskin di daerah perkotaan. LSM-LSM ini telah berpengaruh besar pada pemerintah pusat dan propinsi untuk peran serta aktif mereka dalam membela hak-hak penduduk daerah kumuh yang dipermiskin dan dikesampingkan oleh pengembangan daerah-daerah metropolitan.

Kenyataan yang menjanjikan adalah kembalinya YLBHI setelah kepemimpinan yang tidak jelas yang lama. Dengan direktur barunya, YLBHI telah mendapatkan kembali pengaruh dan reputasi politiknya dalam perdebatan-perdebatannya mengenai isu-isu hukum dan pembelaan HAM.

b. Pengembangan Komunitas

LSM-LSM yang mengkhususkan diri dalam pengembangan komunitas telah melibatkan diri secara langsung dengan program pengurangan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan. LSM-LSM seperti Bina Swadaya, Bina Desa, Dian Desa,

LP3ES, CD Bethesda, YMU (dengan pendekatan model Grameen Banknya), ASPPUK, LAKPESDAM-NU, Muhammadiyah dengan jejaring mereka di daerah-daerah telah memberikan solusi strategis dan praktis secara proaktif terhadap pengurangan kemiskinan, kesehatan komunitas, air dan sanitasi, perbankan bagi kaum miskin, tanggapan-tanggapan atas bencana, pendidikan dan perumahan bagi kaum miskin.

Bersama dengan organisasi-organisasi tersebut, INFID berperan serta dalam pengembangan jejaring bagi advokasi mengenai pengurangan kemiskinan (dari advokasi Makalah/Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan/PRSP hingga APBN). Jejaring-jejaring seperti JARI, KIKIS, dan GAPPRI berada diantara kelompok-kelompok yang menghubungkan seluruh LSM yang bekerja pada campuran perekonomian secara langsung. Jejaring-jejaring ini secara aktif melakukan advokasi dan pertemuan langsung dengan pemerintah dari tingkat nasional hingga kabupaten.

c. Keadaan Darurat dan Bencana

Harus diakui bahwa, walaupun campur tangan LSM-LSM di Indonesia baru dimulai baru-baru ini saja, beberapa LSM memiliki kapasitas dalam mengelola dan mengimplementasikan program-program dan tindakan-tindakan dalam manajemen dan pengurangan bencana. Organisasi-organisasi seperti Dian Desa, YAKKUM Emergency Unit (YEU), Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI), Dompot Dhuafa, Asian Muslim Action Network (AMAN) merupakan beberapa dari LSM-LSM yang memiliki kapasitas dan secara konsisten mengembangkan kapasitas mereka bagi penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Organisasi-organisasi setempat di daerah-daerah bencana perlahan-lahan telah meningkatkan kapasitas mereka dalam manajemen dan implementasi program pemulihan, seperti yang di Aceh, Yogyakarta dan Jawa Tengah, NTT, Maluku, dan Sulawesi.

Organisasi-organisasi ini bekerja hampir di seluruh daerah bencana di Indonesia. Beberapa diantara organisasi-organisasi ini adalah pendiri INFID (YAKKUM melalui CD Bethesda, PGI – pada awalnya pendiri YTBI, Dompot Dhuafa – didirikan oleh para pendiri INFID, dan AMAN baru saja mendaftar untuk menjadi anggota INFID).

d. Pembangunan Kapasitas

Terdapat kelompok-kelompok LSM seperti jejaring INSIST (Indonesian Society for Social Transformation), Satunama, Bina Desa, YAPPIKA dan lain-lain yang memberikan dukungan bagi organisasi-organisasi lain dalam layanan pembangunan kapasitas. Anggauta-anggauta INSIST mengembangkan pusat-pusat pelatihan dan jejaring para pelatih dan fasilitator di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jakarta, Yogyakarta (dan Solo), Bali, Maluku dan NTT. Satunama telah mendirikan suatu pusat pelatihan permanen di Yogyakarta dan memberikan layanan-layanan bagi banyak LSM. Bina Desa dan YAPPIKA secara aktif memberikan bantuan langsung bagi partner-partner mereka di daerah-daerah seluruh Indonesia.

e. Organisasi dan Pergerakan Perempuan

Suatu perkembangan yang menarik adalah timbulnya pergerakan-pergerakan organisasi-organisasi perempuan melalui beragam organisasi seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, PPSW, dan Asosiasi Janda (PEKA), ASPPUK dan jejaring mereka. Organisasi-organisasi ini telah mempunyai posisi yang kuat baik di tingkat pekerja maupun tingkat politis nasional.

Suara organisasi-organisasi perempuan telah semakin mendapatkan kekuatan politis melalui organisasi-organisasi ini. Kuota bagi perempuan dalam perwakilan politik telah diakomodasi oleh partai-partai politik. Organisasi-organisasi ini juga telah melibatkan diri dalam penganggaran dan anggaran gender bagi MDGs. Konsep penganggaran gender telah secara resmi diterima oleh pemerintah (sebagai suatu SK Menteri) dan tengah menanti panduan resmi dan operasional.

f. Organisasi-organisasi Masyarakat

Organisasi-organisasi masyarakat yang dikaitkan dengan federasi serikat tani dan serikat-serikat buruh seperti FSPI, API, AGRA, SBSI, LIPS, dan KASBI dsb dengan jejaring mereka dari tingkat nasional hingga lokal mulai mendapatkan kekuatan mereka di arena politik. Demikian pula dengan aliansi masyarakat tradisional Indonesia (AMAN) yang memberikan kontribusi pada pengokohan solidaritas antara masyarakat tradisional bagi hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil sampai tahap tertentu juga telah terfragmentasi dan menjadi secara sempit terfokus hanya pada isu-isu perhatian mereka sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam meluncurkan aksi-aksi bersama. Walaupun terfragmentasi, organisasi-organisasi mempunyai tingkat kepedulian dan solidaritas yang sama karena mereka juga berhubungan dengan jejaring nasional yang sama seperti INFID, Walhi, FSPI, KPI, ASSPUK, Bina Desa, KONTRAS, YLBHI dan lain-lain. Jejaring-jejaring ini mengakomodasi beberapa organisasi dari tingkat nasional hingga lokal.

g. Organisasi-organisasi Pekerja Migran

Salah satu organisasi masyarakat yang penting di Indonesia yang harus diperhitungkan sebagai agen perubahan adalah organisasi-organisasi pekerja migran, seperti Migrant Care. Pada tahun 2006 organisasi-organisasi ini mampu memaksa pemerintah untuk meningkatkan layanan-layanan bagi para pekerja migran di luar negeri dan mendorong pemerintah untuk memberikan lebih banyak perhatian pada para pekerja migran.

Organisasi-organisasi ini mampu menguak kasus-kasus korupsi di Kedutaan-kedutaan dan Konsulat-konsulat Indonesia di luar negeri. Salah satu kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan, yang melibatkan hampir seluruh pegawai di Konsulat Indonesia di Penang, Malaysia. Kasus ini akan mendorong pemerintah untuk membrantas korupsi oleh pejabat-pejabat di luar negeri.

Sejak saat itu, Departemen Luar Negeri memberikan lebih banyak perhatian pada para pekerja migran. Dalam beberapa kegiatan internasional, kedutaan-kedutaan

tersebut membentuk kelompok-kelompok bersama dengan organisasi-organisasi pekerja migran.

Walaupun demikian, terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi organisasi-organisasi ini. Pertama, beberapa pelaku senior LSM telah direkrut oleh atau pindah ke partai-partai politik atau menduduki posisi di pemerintahan (bupati di tingkat kabupaten, gubernur di tingkat propinsi atau Komisi-komisi pemerintah di tingkat nasional). Hingga taraf tertentu hal ini menimbulkan masalah pengisian kekosongan di organisasi sehubungan dengan sumber daya manusia. Ini memberikan keuntungan dan kekurangan. Beberapa dari aktifis yang beralih menjadi politikus masih memelihara hubungan erat dengan LSM-LSM dan membantu dalam pertemuan-pertemuan dengan para pembuat keputusan. Beberapa lainnya sepenuhnya memutuskan hubungan dengan LSM dan hanya bekerja untuk kepentingan partai-partai politik.

Kedua, timbul bentuk LSM baru atau quasi LSM (QuaNGO) yang didirikan oleh partai-partai politik, politikus atau kelompok-kelompok keagamaan dengan visi fundamentalis yang didukung oleh militer dan polisi. Dalam masa Orde Baru masyarakat mengenal istilah “LSM plat merah” yang mengacu pada LSM yang merupakan afiliasi atau didirikan oleh pejabat pemerintah. Di masa Orde Baru organisasi-organisasi ini tidak peduli akan keberadaan LSM lainnya atau LSM yang sesungguhnya. Jenis LSM yang baru (QuaNGO) aktif berkampanye menentang LSM yang sesungguhnya. Hal ini merupakan tantangan bagi LSM-LSM di Indonesia saat ini.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil, khususnya LSM-LSM, masih merupakan tulang punggung demokrasi, pembelaan HAM, dan saluran suara kaum miskin di Indonesia. Peran mereka strategis dan tanpa mereka demokrasi dan HAM akan diselewengkan dan dilumpuhkan.

IV. KEGIATAN-KEGIATAN INFID DI TAHUN 2006

Di tingkat nasional beberapa kegiatan INFID (termasuk pernyataan-pernyataan umum) ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah, parlemen dan perwakilan-perwakilan IFI (Institusi-institusi Keuangan Internasional)

- 4.1 Setelah *International Conference on Illegitimate Debt*/Konferensi Internasional mengenai Hutang Haram pada bulan Mei 2006, INFID membuat pernyataan umum bahwa seluruh hutang merupakan subyek bagi audit secara terbuka dan transparan. Menanggapi pernyataan tersebut, BPK RI mengirimkan surat resmi kepada Bappenas untuk membuka proyek-proyek dan membiarkan BPK mengaudit proyek-proyek tersebut. Permintaan tersebut ditanggapi positif oleh Bappenas, walaupun sampai sekarang pengauditan tersebut belum dijalankan. Walaupun demikian, Bappenas telah mulai mempelajari hutang-hutang. Suatu tindakan yang menarik adalah Bappenas mengumumkan pembatalan pinjaman-pinjaman yang proyek-proyeknya belum diimplementasikan. Hal ini menghindarkan meningkatnya jumlah bunga dan biaya komitmen terhadap para kreditor.
- 4.2 Laporan oleh delegasi perempuan ke Pertemuan Komisi PBB mengenai Status Kaum Perempuan yang kemudian digunakan oleh delegasi Indonesia sebagai laporan resmi Indonesia. Pemimpin delegasi perempuan INFID kemudian diminta oleh delegasi Indonesia untuk menjadi jurubicara dalam Pertemuan tersebut.
- 4.3 Presentasi INFID di konferensi UNESCAP mengenai MDGs pada bulan April 2006 ditanggapi baik oleh UNESCAP dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta INFID untuk meningkatkan kerjasama dalam pemantauan pencapaian MDGs, dan dalam membuat kebijakan-kebijakan lebih operasional.
- 4.4 Imbauan INFID bagi Reformasi CGI ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Serangkaian diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melibatkan INFID. Sejak bulan Juli 2006 terdapat 4 pertemuan dan seminar mengenai masalah CGI dan strategi peminjaman. Pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar tersebut diadakan di Kantor Bank Sentral dan Bappenas.
- 4.5 Pertemuan dengan Menteri Pertahanan pada bulan Mei 2006 diubah menjadi lokakarya 3 jam di kantor Menteri tersebut. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meminta Menteri menulis pengantar bagi buku INFID mengenai Kredit Ekspor bagi Pembelian Peralatan Militer. Menteri mengundang semua dirjen dalam Departemen tersebut dan perwakilan-perwakilan Angkatan Darat, Udara dan Laut untuk melakukan diskusi mendalam dengan team INFID. Diskusi tersebut difokuskan pada analisa biaya dan keuntungan dan perundang-undangan akuisi militer. Beberapa kesimpulan penting dapat ditarik; yang kemudian ditindak lanjuti oleh Departemen tersebut dengan kebijakan-kebijakan operasional seperti perjanjian integritas, transparansi dalam anggaran militer, penataan ulang dalam akuisisi militer untuk menghindari mekanisme kredit ekspor.

- 4.6 Pertemuan dan diskusi dengan parlemen mengenai “Hutang dan APBN” yang mendorong parlemen untuk menyelesaikan undang-undang tentang peminjaman luar negeri, ditanggapi secara positif oleh Parlemen. Untuk mempublikasikan isu tersebut, MetroTV meminta INFID dan wakil ketua Komisi XI (komisi anggaran dan keuangan) untuk mendiskusikannya secara langsung di televisi. Para pembicara dari parlemen dan INFID. Hal ini mendorong Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri untuk melanjutkan perancangan Undang-undang Pinjaman Luar Negeri. Perlu dicatat bahwa pernyataan-pernyataan para anggota parlemen di hadapan publik selalu ditanggapi oleh Departemen-departemen.
- 4.7 Sewaktu INFID mengumumkan INFID sedang melakukan riset mengenai Debt Swap, pemerintah memberikan perhatian serius pada debt swap. Para peneliti INFID juga mewawancarai beberapa orang di departemen-departemen. Hasil riset dijadikan pedoman departemen-departemen tersebut bagi kerangka kerja konseptual proposal debt swap.
- 4.8 Kampanye mengenai MDGs dan GCAP menarik perhatian Pemerintah maupun Badan-badan PBB. INFID dan para partnernya meluncurkan kampanye sebulan mengenai MDGs pada bulan November – Desember. Pernyataan publik INFID ditanggapi langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dalam media public (Harian Kompas dan televisi). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa pemerintah masih belum dapat menangani kemiskinan dan memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tetapi ia menyalahkan Konstitusi yang membatasi ruang gerak eksekutif sementara menetapkan standar tinggi bagi pencapaian eksekutif.



Konferensi Pers mengenai Evaluasi dua Tahun Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono: Infid, Migrant Care, Fatayat NU, UPC, GAPRI, dsb.

Diskusi radio secara langsung yang diselenggarakan INFID beserta para partner selama kampanye MDGs dan HAM melibatkan beragam pihak terkait, dari politikus, pemerintah, para pelaku bisnis, organisasi masyarakat, akademisi dan LSM-LSM sebagai nara sumber atau pembicara di radio (baik lokal maupun nasional). Diskusi interaktif di radio menarik perhatian masyarakat umum.

Kampanye tersebut menjadi lebih mudah dalam menarik perhatian masyarakat umum baik tingkat lokal maupun nasional karena media masyarakat umum dan masyarakat masih dipengaruhi oleh informasi yang diterbitkan dari IPF di Batam pada bulan September. Media cetak, televisi, dan radio (nasional dan lokal)

masih mendapat informasi mengenai isu-isu yang didiskusikan selama IPF di Batam.

4.9 Kampanye IPF di Batam pada bulan September 2006 bersamaan dengan Pertemuan Tahunan IMF/Bank Dunia menimbulkan perdebatan umum diantara elit politik di Jakarta. Media umum meliput perdebatan-perdebatan tersebut. Salah satu topik perdebatan adalah mengenai hubungan Indonesia dengan IMF. Pada bulan November 2006 pemerintah Indonesia memutuskan untuk membayar kembali/melunasi seluruh pinjaman dari IMF. Pernyataan Menteri Keuangan dalam Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura pada bulan September 2006 tidak dapat dipisahkan dari tuntutan-tuntutan masyarakat sipil bahwa Indonesia harus menghindari resep-resep kebijakan yang tidak perlu dari Bank Dunia dan IMF.

Sesudah IPF di Batam, terdapat beberapa aksi di tingkat nasional dan lokal. Di tingkat lokal, para petani Bengkulu yang menghadiri IPF di Batam mulai menelaah kembali proyek perkebunan *cash crop* kecil yang didanai oleh pinjaman ADB dan mengkategorikannya sebagai hutang haram karena melibatkan korupsi dan proyek tersebut gagal. Advokasi mengenai proyek ini telah dilakukan sejak tiga tahun lalu tetapi tidak berhasil. Setelah IPF organisasi-organisasi petani merasa yakin bahwa pinjaman-pinjaman tersebut dapat dikategorikan sebagai haram dan harus dibatalkan, dan mereka memulai advokasi kembali.

Apa yang telah dilakukan para petani di Bengkulu diikuti oleh masyarakat tradisional dan petani di Kalimantan Selatan, dimana proyek yang sama juga diimplementasikan. Beberapa organisasi dari Kalimantan Selatan menghadiri IPF dan terinspirasi oleh informasi mengenai hutang-hutang haram, kemiskinan, dan peran masyarakat dalam proyek-proyek tersebut.

Banyak institut-institut riset dan organisasi pemikir di Jakarta termasuk partai-partai politik mulai memunculkan isu posisi IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Habibie Center misalnya, melakukan serangkaian diskusi sejak bulan Desember 2006. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memulai diskusi mengenai Hutang, Institusi Keuangan Internasional, dan MDGs dan diterbitkan dalam buletin bulanan mereka.

V. KESEPAKATAN DENGAN TARGET ADVOKASI INTERNASIONAL

Berikut ini perincian kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan pada tahun 2006

Januari 2006

- Pertemuan Para Pakar mengenai Reformasi Sektor Keamanan di Amsterdam

Februari – Maret 2006

- Bagian dari Delegasi ke Komisi mengenai Status kaum Perempuan: Evaluasi Deklarasi Beijing, New York.
- Komisari PBB mengenai Pengembangan Sosial
- Komisari Tinggi PBB untuk HAM, diwakili oleh Pax Romana dan Raca Institute. Memberikan masukan pada Perwakilan Tetap Indonesia di PBB.

April 2006

- Berpartisipasi dalam Konferensi UNESCAP (6 – 12 April 2006): INFID diminta dan ditawarkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia untuk mewakili masyarakat sipil mempresentasikan pandangan-pandangan mengenai status pencapaian MDGs dan strategi bagi pencapaian MDGs.
- Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan IMF di



Dian Kartika Sari, Wakil Direktur Eksekutif INFID dalam suatu panel bersama dengan Menlu, Dirjen UNESCAP, Direktur WHO, UNDP dsb. dalam Sesi ke 62 UNESCAP, April 2006.

Washington: perjanjian mengenai seminar-seminar bersama antara INFID dan Bank Dunia/IMF dalam Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. INFID bersama kelompok organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengajukan pengawasan parlementer atas hutang-hutang dan persetujuan-persetujuan global

Mei 2006

- Konferensi Internasional mengenai Hutang Najis dan Haram/*International Conference on Odious and Illegitimate Debt* di Jakarta. Untuk mengembangkan pemahaman umum dan strategi bersama mengenai advokasi menentang hutang najis dan haram, dan untuk mengokohkan partisipasi para partisipan INFID dari Indonesia dalam kampanye hutang.

Juni 2006

- Berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan ADB di Hyderabad: untuk memperkokoh jejaring mengenai pemantauan proyek-proyek dan program-program yang didukung ADB. Ditindaklanjuti dengan suatu pertemuan mengenai Mekanisme Kesesuaian (Compliance Mechanism) dengan ADB di Jakarta.
- Berpartisipasi dalam Pertemuan CGI di Jakarta. INFID membacakan dan mengajukan pernyataan mengenai:
 - Penghapusan hutang bagi proyek-proyek di daerah-daerah bencana
 - Pemulihan Yogyakarta tanpa hutang
 - Campurtangan pada kasus Munir
- Mengubah CGI dari forum untuk pemastian pinjaman menjadi Forum Dialog Kebijakan.

Agustus 2006

- Berpartisipasi dalam Lokakarya mengenai WTO dan Putaran Doha di Jenewa, dengan Third World Network. Pertemuan dengan Perwakilan Tetap Indonesia, Cina, India, Kenya, Uruguay, Brasil, dan Singapura.
- INFID menandatangani persetujuan kerjasama dengan NINDJA (LSM yang berbasis di Tokyo). NINDJA bertindak selaku kantor penghubung INFID di Jepang, dimana seorang petugas penghubung bekerja pada kampanye isu-isu pembangunan Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan pinjaman-pinjaman Jepang. Jepang merupakan negara kreditor terbesar Indonesia.

September 2006

- Kampanye mengenai Hutang Haram di AEPF, Helsinki
- Pertemuan dengan pejabat-pejabat senior di Departemen Luar Negeri Finlandia. Topik: penghapusan hutang dan pendanaan hutan.
- Forum Masyarakat Internasional/International People's Forum di Batam, pertemuan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.
- INFID mempresentasikan temuan-temuan awal suatu riset mengenai Bantuan Pembangunan Resmi/Official Development Assistance (ODA) Jepang di Indonesia, dengan fokus pada tiga bendungan besar yang cenderung dikategorikan sebagai hutang haram. Hadir pada seminar tersebut pejabat-pejabat senior Bappenas, Departemen Keuangan, Kementerian Koordinator Urusan Perekonomian, Departemen Luar Negeri, perwakilan JBIC, akademisi dan para partisipan INFID di Jakarta.

Oktober 2006

- INFID berpartisipasi dalam konferensi reformasi keamanan di Jenewa. Pejabat Program Reformasi Sektor Keamanan dari Jakarta dan Petugas Penghubung dari Belgia menghadiri konferensi tersebut. Hal ini terutama untuk memperluas cakupan kerangka kerja program dan jejaring INFID mengenai reformasi sektor keamanan.
- INFID diundang untuk memberikan presentasi mengenai “hutang dan kemiskinan” dan “anggaran militer” dalam suatu diskusi dan lokakarya asosiasi Persahabatan Indonesia -Jerman/*Indonesia-German Friendship association* di Aachen, Jerman.

November 2006

- INFID mengadakan pertemuan para donor di Brussels: EED, NOVIB, 11.11.11, HIVOS dan beberapa anggota Dewan pengurus INFID. Pertemuan didahului dengan suatu presentasi pelaku evaluasi eksternal mengenai evaluasi atas INFID.
- Kantor Penghubung INFID di Brussels bekerja sama dengan 11.11.11 mengadakan seminar sehari: ini merupakan seminar pertama yang dilakukan INFID di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Para partisipan dan partner INFID di Eropa menghadiri seminar yang mendiskusikan beberapa isu: HAM, militer dan keamanan, hutang dan kemiskinan, dan isu khusus mengenai Papua. Para pembicara berasal dari Indonesia dan Eropa.⁷ Laporan mengenai seminar tersebut oleh *Jakarta Post* ditanggapi oleh para pejabat pemerintah di Jakarta, dengan mengadakan beberapa diskusi dengan staf INFID. Seminar tersebut ditindak lanjuti dengan suatu lokakarya kecil yang difasilitasi oleh Bapak Meth Kusumahadi dari Satunama (beliau merupakan pelaku evaluasi eksternal). Lokakarya tersebut terutama untuk mempetakan peran masing-masing partisipan dan partner INFID di Eropa.

November-Desember 2006

- Petugas Penghubung di Brussels berpartisipasi dalam Brussels Communiqué mengenai GCAP, untuk mengembangkan strategi bersama dalam menyerang kemiskinan pada level global.

⁷ Seminar di Brussels dilaporkan dalam dua seri artikel di Jakarta Post oleh reporter Jakarta Post yang hadir di seminar tersebut. Seminar tersebut juga disiarkan di Hilversum, radio negeri Belanda, seksi Indonesia.

VI. KESEPAKATAN DENGAN TARGET ADVOKASI NASIONAL

Mei 2006

- Diskusi dengan Departemen Pertahanan dan seluruh pejabat senior dalam Departemen tersebut dan Pejabat-pejabat TNI mengenai Kredit Ekspor bagi Pembelian Persenjataan, di kantor Departemen Pertahanan. Menteri Pertahanan menyepakati untuk mengadakan diskusi dan pertemuan secara teratur mengenai reformasi sektor keamanan.

Juni 2006

- Pertemuan dengan Fraksi PKB dan Komisi XI: untuk mendiskusikan hutang dan APBN, dan untuk mendiskusikan kesempatan-kesempatan mengadakan pemantauan parlementer atas hutang dan perjanjian internasional oleh Eksekutif. Diskusi dilanjutkan dengan acara temu bicara langsung di televisi “MetroTV” dengan para pembicara utama perwakilan Komisi XI dan Dian dari INFID.



INFID mengadakan pertemuan dan diskusi dengan Menteri Pertahanan mengenai Kredit Ekspor, Transparansi Anggaran Militer, dsb. di kantor Menteri Pertahanan. Juga terlibat empat dirjen Departemen Pertahanan.

Juli 2006

- Diskusi mengenai Strategi Peminjaman, Keefektifan Bantuan dan Audit Hutang: dengan Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator bagi Perekonomian, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri. INFID merupakan salah satu pembicara utama bersama dengan Penasihat Presiden bidang Ekonomi, Wakil Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, dan Wakil Direktur Bursa Efek Jakarta, di kantor Bank Indonesia.

Juli 2006

- Peluncuran buku “Kredit Ekspor bagi Pembelian Persenjataan.” Seminar tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan, para pejabat senior Departemen Pertahanan, para Jenderal TNI, para Jenderal Purnawirawan, Tim Pusat Layanan dan Riset Sosial/*Centre for Social Service and Research* dari kelompok-kelompok masyarakat Sipil, akademisi, dan para jurnalis senior.

Buku tersebut digunakan TNI sebagai acuan selama “Rapat Pimpinan Tahunan” Angkatan Bersenjata dan Departemen Pertahanan pada bulan Desember 2006. (Mereka memesan 60 buku dari INFID)

Agustus 2006

- Rangkaian diskusi dan pertemuan tentang Reformasi CGI dengan Bank Indonesia, BAPPENAS, Departemen Keuangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Departemen Pertahanan dan Kepolisian, di kantor Bank Indonesia.



INFID mengadakan pertemuan dan diskusi dengan Menteri Pertahanan mengenai Kredit Ekspor, Transparansi Anggaran Militer, dsb. di kantor Menteri Pertahanan. Juga terlibat empat dirjen Departemen Pertahanan.

September 2006

- Diskusi mengenai debt swap dengan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator bidang Ekonomi, BAPPENAS, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional, dan Kedutaan-kedutaan, di kantor departemen Keuangan.
- Acara talk show di MetroTV antara INFID, Pemerintah, dan Bank Dunia mengenai korupsi di proyek-proyek Bank Dunia. Isunya adalah Bank Dunia meminta pemerintah untuk menarik kembali dananya dari proyek-proyek yang diindikasikan sebagai terkorup oleh para pejabat pemerintah dan para kontraktor. Bank Dunia diwakili



Seminar mengenai riset INFID tentang Debt Swap, dihadiri para pejabat Departemen Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen Luar Negeri, dan staf Kedutaan-kedutaan Asing

oleh Direktur Wilayah, pemerintah diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan INFID diwakili oleh Chris Wangkay (PO bagi kampanye hutang)

November 2006

- Seminar mengenai Debt Swap. INFID mempresentasikan hasil riset mengenai Debt Swap. Seminar dan diskusi untuk partisipan terbatas dari para pejabat pemerintah dan kedutaan-kedutaan asing: Departemen Keuangan, BAPPENAS, Departemen Kesehatan, dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bank Indonesia dan Departemen Pendidikan Nasional.

Desember 2006

- Berpartisipasi dalam perancangan Peraturan Presiden mengenai Pengarus-utamaan Gender dalam APBN dan dalam Program Pengurangan Kemiskinan.
- Menteri Keuangan menjanjikan untuk meninjau kembali anggaran kabupaten dan propinsi dan menolak anggaran-anggaran yang tidak berbasis gender.

25 November - 22 Desember 2006: “Melawan Kemiskinan: suatu Kewajiban bukan Belas Kasihan”

Sejak 25 November hingga 22 Desember 2006, INFID bersama para partner dan jejaring meluncurkan kampanye nasional melawan kemiskinan. Kampanye tersebut melibatkan LSM-LSM, korban-korban pelanggaran HAM, ODHA, organisasi-organisasi masyarakat, artis, akademisi, mahasiswa, murid SMA dan media massa (televisi, radio dan media cetak). Kegiatan-kegiatannya termasuk:



Peluncuran kampanye sebulan melawan kemiskinan (GCAP), pada bulan November- Desember.

- a) Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan: 25 November
- b) Hari Aids Dunia: 1 Desember
- c) Hari Penyandang Cacat Dunia: 3 Desember
- d) Hari HAM : 10 Desember
- e) Hari Pangan Dunia: 13-14 Desember
- f) Hari Buruh Migran Dunia: 18 Desember
- g) Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia: 22 Desember

Kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan satu sama lain dari tingkat lokal hingga nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Sidang Umum Ekstra INFID. Hal ini membantu pengkoordinasian para partisipan nasional dan regional dalam meluncurkan imbauan dalam kampanye-kampanye tersebut.

Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dilakukan baik di Lampung, oleh Damar Lampung (LSM setempat) dan di Jakarta oleh INFID dan para partisipannya yang berbasis di Jakarta. Sementara kampanye mengenai AIDS dipimpin oleh Solidaritas Perempuan di Jakarta dan didukung oleh Sekretariat INFID serta jejaring-jejaring AIDS lainnya. Kampanye Hak-hak para Penyandang Cacat dilakukan oleh Federasi Penyandang Cacat Indonesia, chapter Jakarta, didukung Sekretariat INFID dan para partisipan di Jakarta. Kampanye HAM diselenggarakan di beberapa tempat di Indonesia: Jakarta, Kupang (NTT), Jember (Jawa Timur), Klaten (Jawa Tengah), dan Lampung (Sumatra). Para partisipan, partner, dan jejaring melakukan beragam bentuk kampanye: media massa, konser musik, dan seminar, talk show di radio dan televisi, dan mobilisasi di jalan. Cakupan media dari tingkat lokal hingga nasional.

Saat Hari Pangan se Dunia (13 Desember) juga dijadikan kesempatan untuk memobilisasi organisasi-organisasi yang bekerja pada bidang pertanian, kedaulatan pangan, pengurangan kemiskinan, dan perempuan untuk mendiskusikan kewajiban negara memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat atas pangan. Seminar tersebut juga diikuti dengan peluncuran sebuah buku, “The State Obligation and the Fullfilment of ESC Rights” (“Kewajiban Negara dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”). Seminar tersebut dilakukan bersama oleh beragam organisasi: Bina Desa, Konphalindo, Walhi, INFID, KRKP, Kruha, PBHI dan FSPI (Via Campesina)

Hari Buruh Migran se Dunia (18 Desember) dirayakan dengan beberapa kegiatan: dialog dengan pemerintah, mobilisasi jalan, diskusi dan upacara keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan para pejabat pemerintah, para buruh migrant dan keluarga mereka, INFID, Migrant Care, Fatayat NU, dan Kapal Perempuan. Departemen Luar Negeri mengambil kesempatan tersebut untuk mengadakan jamuan makan dengan Pakar Khusus PBB mengenai Buruh Migran yang mengunjungi Indonesia saat itu.

Puncak Bulan Kampanye Anti Kemiskinan adalah konferensi mengenai Pendidikan Alternatif bagi Perempuan dan Keadilan dan Perdamaian Global di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kapal Perempuan dan INFID. Benang merah seluruh isu yang dikampanyekan dalam bulan tersebut adalah kaum perempuan: kemiskinan dan perempuan, HAM dan perempuan, pendidikan dan perempuan, masyarakat penyandang cacat dan perempuan, pangan dan perempuan, kesehatan dan perempuan, dan buruh migrant dan perempuan. Hal ini dibuat untuk memfokuskan pada dan mendukung kampanye dan lobi oleh organisasi-organisasi perempuan bagi penganggaran gender, pengurangan kemiskinan berbasis pada gender, dan kuota perempuan dalam partai-partai politik dan parlemen. Karenanya puncak kampanye adalah pada Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia (22 Desember—yang secara konvensional adalah Hari Ibu di Indonesia).

Maret – November (tiga konferensi mengenai Pengembangan Manusia)

INFID dilibatkan dalam serangkaian konferensi mengenai Pengembangan Manusia di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial. INFID mengajukan perspektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan memastikan aspek-aspek pendanaan penindak-lanjutan konferensi-konferensi dan rencana-rencana aksi. INFID dan seluruh partisipan yang bekerja pada advokasi mengenai anti pemiskinan dan pengembangan manusia berperan aktif dalam konferensi-konferensi dan diskusi-diskusi tersebut.

Januari – Desember: Mengelola sistem informasi

Pengelolaan sistem informasi (pengumpulan, penyediaan dan penyebaran informasi) dengan memformat ulang situs INFID, mengembangkan newsletter elektronik dwi-bahasa, menyediakan pangkalan data mengenai para partisipan, jejaring dan target advokasi INFID, perkembangan isu-isu inti INFID di media, liputan media mengenai pernyataan dan komentar INFID, artikel isu-isu inti INFID yang ditulis oleh staf INFID yang diterbitkan di media. Kegiatan-kegiatan lainnya termasuk merekam dan mendokumentasikan kerja-kerja INFID dalam bentuk video.



VII. PEMBERDAYAAN PARA PARTISIPAN

Juni – Agustus

Dukungan bagi Solidaritas Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Para anggota Dewan Pengurus INFID mengunjungi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bersama dengan para partisipan di Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan kampanye bagi “Pemulihan tanpa Hutang”. Gubernur Yogyakarta mengenakan T-Shirt “Recovery without Debt” dari INFID saat beliau menemui Delegasi CGI dan Wakil Presiden Indonesia.

INFID mendukung para partisipan di Yogyakarta (melalui Forum LSM) bagi pengajuan tuntutan secara hukum oleh masyarakat terhadap pemerintah pusat atas kelambatan tanggapan atas bencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Juli – September

- Berpartisipasi dalam Pertemuan Sidang Umum Foker LSM Papua, dan memulai menyusun strategi pengembangan organisasional dan pengembangan program Foker LSM Papua.
- Memfasilitasi para partisipan di Papua (Foker LSM Papua) untuk melakukan advokasi di Eropa: Finlandia, Jerman dan Belanda, dimana mereka mengadakan dialog dan diskusi dengan jejaring advokasi mengenai Papua di Eropa, dan pertemuan dengan Departemen Luar Negeri Finlandia dan Crisis Management Institute (Institut Manajemen Krisis) di Helsinki

Oktober 2007

- Mempersiapkan team advokasi dan strategi advokasi bagi isu-isu Sulawesi, dengan para partisipan dari Sulawesi.

VIII. PERKEMBANGAN INSTITUSIONAL

- Januari 2006 : review skema gaji staf INFID
- Maret – April: perekrutan Direktur Eksekutif
- April 2006: Rapat Dewan Eksekutif
- April dan Juli 2006: Evaluasi kerangka kerja PME dan analisa laporan
- Juni 2006: Rapat Dewan Pengurus Indonesia
- Juni 2006: Rapat Dewan Pengurus Lengkap INFID
- Juli 2006: Diskusi mengenai struktur organisasional INFID
- Juli 2006: Diskusi mengenai mekanisme manajemen INFID
- September 2006: Evaluasi INFID oleh pelaku evaluasi eksternal
- Oktober 2006: Rapat Dewan Eksekutif
- November 2006: Review Evaluasi Eksternal
- November 2006: Rapat Paripurna Dewan Pengurus
- November 2006: Sidang Umum Ekstra: mengubah peraturan dan bentuk hukum INFID
- Desember 2006: Evaluasi tahunan atas program dan perencanaan tahunan, dan lokakarya mengenai pengembangan institusional. Evaluasi dan perencanaan ini difasilitasi oleh Semerlak Cerlang Nusa (SCN) didukung oleh D&P. Para partisipan INFID yang berbasis di Jakarta dan anggota Dewan yang masih berada di Jakarta berpartisipasi dalam evaluasi program dan perencanaan tahunan.

Evaluasi program tahunan dan perencanaan tahunan ini juga merupakan titik balik bagi struktur dan fokus program sekretariat INFID. Advokasi INFID harus didasari pada riset yang kuat, dan karenanya perhatian khusus akan diberikan pada riset di tahun 2007 pada ketiga isu INFID secara keseluruhan.



Sidang Umum Ekstra INFID, November 2006.

IX. IPF DAN PERTEMUAN TAHUNAN BANK DUNIA/IMF 2006

Forum Masyarakat Internasional/International People's Forum (IPF) di Batam pada bulan September 2006 yang dituan-rumahi oleh INFID merupakan momentum penting bagi INFID untuk meluncurkan imbauan untuk menyadarkan masyarakat sipil di Indonesia. Seluruh organisasi di tingkat nasional ambil bagian dalam IPF, dan secara sistematis mempersiapkan agenda mereka sendiri untuk menanggapi Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF yang diadakan di Singapura.

IPF didahului dengan suatu konferensi internasional mengenai Hutang Haram, sebagai kerjasama antara Ibon Filipina dan INFID, di Jakarta pada bulan April 2006.

Konferensi tersebut dihadiri oleh para partisipan internasional dari Asia, Afrika, Amerika Latin, Eropa dan Amerika Utara. Para partisipan INFID dari seluruh daerah mengambil bagian dalam konferensi tersebut. Inilah waktunya bagi INFID untuk mengembangkan komunikasi yang lebih kuat dengan para partisipan di daerah-daerah tersebut. Para partisipan memutuskan untuk mengambil bagian dalam Forum Masyarakat Internasional/International People's Forum.



The International People's Forum (IPF) di Batam bukan September 2006, sejajar dengan Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Singapura.

Persiapan IPF merupakan suatu tantangan karena tidak diberikan izin dari kepolisian, bahkan kepolisian propinsi dan daerah di Batam tidak mengizinkan INFID untuk menyelenggarakan IPF di Batam. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Batam didorong pemerintah Singapura untuk tidak mengizinkan kelompok masyarakat sipil menyelenggarakan konferensi tersebut di Batam. Didukung oleh alumni INFID di kalangan kaum elit dan nama baik INFID sebagai rekan pemerintah di masa-masa lampau, izin tersebut diberikan setelah rapat khusus Kabinet. Para menteri yang berhubungan erat dengan INFID sebagai partner dalam dialog-dialog kebijakan seperti Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri mendukung inisiatif INFID bagi penyelenggaraan IPF.

Walaupun IPF berada dalam pengamatan ketat dari ratusan polisi dan militer (termasuk pasukan anti teroris), IPF diliput oleh media massa dari tingkat lokal hingga internasional baik secara tercetak maupun elektronik. IPF bagi INFID dan masyarakat sipil Indonesia merupakan suatu bahan percobaan apakah pemerintah Indonesia sesungguhnya menghargai demokrasi dan kebebasan bersuara bagi rakyatnya. IPF juga merupakan suatu materi pengujian bagi masyarakat sipil Indonesia untuk bergabung dalam suatu aksi solidaritas. Terbukti bahwa IPF telah berhasil memobilisasi dukungan dari mayoritas kelompok masyarakat sipil. Liputan

media membantu penyebaran pesan dari IPF. Masyarakat berangsur-angsur memahami agenda IMF dan Bank Dunia karena media lokal juga meliput dan menerbitkan hasil-hasil dari IPF.

IPF diprakasai oleh jejaring Jubilee South, dan seluruh jejaring internasional yang bekerja pada advokasi bagi perubahan-perubahan dalam IMF dan Bank Dunia, jejaring bagi penghapusan hutang, kampanye untuk mengakhiri kemiskinan, kampanye bagi pendidikan untuk semua, jejaring buruh migran dan lain-lainnya. INFID sebagai bagian dari jejaring-jejaring ini diminta untuk menjadi penyelenggara nasional dan tuan rumah. INFID mengundang seluruh partisipan dan partner untuk mengambil bagian dalam menyelenggarakan konferensi tersebut. Para partisipan dan partner lalu membentuk suatu panitia yang dinamakan “Aliansi Masyarakat melawan Bank Dunia dan IMF” yang melibatkan mayoritas partisipan dan partner INFID di Indonesia. Bagi Indonesia, ini merupakan kali pertama kegiatan internasional yang dinyatakan berhasil.

Organisasi-organisasi besar (organisasi-organisasi pendiri INFID) seperti Walhi, YLBHI, LP3ES, Bina Swadaya, dan Bina Desa berpartisipasi dalam Konferensi tersebut sejak masa persiapannya. Untuk mengantisipasi konflik atau tindakan-tindakan tak terduga oleh kepolisian dan organisasi-organisasi pro Bank Dunia/IMF, beberapa organisasi menyiapkan dukungan hukum: PBHI, Kontras, Imparsial dan LBH Pers.

Para anggota Dewan Indonesia INFID secara aktif dilibatkan sejak persiapan IPF, bahkan dilibatkan dalam menangani para pejabat pemerintah dan kepolisian di Batam dan Jakarta.

IPF juga membukakan mata para pembuat kebijakan di Jakarta mengenai posisi Indonesia berkaitan dengan IMF dan Bank Dunia. Sebulan setelah IPF, Indonesia membayar kembali seluruh hutang dari IMF dan menutup bukunya dari pemantauan kebijakan-kebijakan keuangan Indonesia

Laporan dari IPF, liputan media, dan pernyataan-pernyataan terlampir.

X. EVALUASI EKSTERNAL

Pada bulan September-Oktober 2006 INFID dievaluasi oleh dua orang pelaku evaluasi eksternal. Evaluasi mencakup program INFID selama tiga tahun sejak tahun 2004 – 2006. Temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi para evaluator, bagi beberapa anggota INFID dan anggota Dewan, mengejutkan. Harus diakui bahwa masa yang dievaluasi merupakan masa dimana INFID berada dalam situasi yang sulit. Terdapat perubahan dalam kepemimpinan dan pergantian staf. Beberapa staf senior yang telah lama bekerja di INFID mengundurkan diri atau mengakhiri kontrak mereka, dan meninggalkan staf yang lebih muda untuk mengambil alih posisi-posisi yang tinggi dan menantang. Perubahan-perubahan kepemimpinan (tiga orang direktur eksekutif dalam waktu tiga tahun) menambahkan permasalahan dalam keadaan Sekretariat INFID.

Walaupun Sekretariat dalam keadaan sulit, program-program sebenarnya diimplementasi sebagaimana direncanakan. Kerja-kerja advokasi internasional dan nasional INFID masih dianggap oleh sasaran kerja advokasi, dan INFID masih dianggap sebagai wakil organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintah, institusi-institusi keuangan internasional dan forum-forum multilateral. Kualitas kerja mungkin menurun karena riset-riset yang ditugaskan pada pelaku eksternal tidak dilakukan sebagaimana mustinya. Staf sekretariat terperangkap dalam tugas-tugas mereka sendiri.

Temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi diterima sebagai pelajaran oleh Dewan dan Sekretariat. Para anggota, dalam Sidang Umum Ekstra, merasa optimis bahwa dengan bentuk hukum baru dan struktur baru Sekretariat, INFID akan dapat memperoleh kembali posisi dan kualitas kerjanya.

Tanggapan atas Evaluasi Eksternal terlampir.

XI. PROGRAM TAHUN 2007

INFID telah mengubah status hukumnya dari Yayasan menjadi Perkumpulan sebagaimana diputuskan oleh Rapat Sidang Umum Ekstra pada bulan November 2006. Sebagai konsekuensinya Sekretariat sebagai badan eksekutif INFID harus meningkatkan kinerjanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Selain itu, berdasarkan evaluasi eksternal dan masukan-masukan dari konsorsium para donor selama Pertemuan tahun 2006 di Brussels dan komunikasi langsung masing-masing donor dengan Sekretariat, INFID harus meningkatkan kualitas layanan dan kinerjanya.

Di tahun 2007 Sekretariat INFID juga memulai suatu struktur baru yang membagi Sekretariat dalam tiga divisi: Riset dan dokumentasi, Kampanye dan Networking, serta Pengembangan Institusional. Perubahan struktur dimaksudkan untuk meningkatkan teamwork dalam Sekretariat dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan INFID.

Kualitas produk sangat bergantung pada riset yang dihasilkan INFID. Maka di tahun 2007, riset akan diprioritaskan. INFID akan mengembangkan team riset yang lebih baik dan kuat. Riset-riset akan ditugaskan pada periset eksternal tetapi dengan pengawasan menyeluruh oleh team riset INFID. Staf INFID juga akan didorong untuk melakukan riset berdasarkan penugasan.

Pembangunan kapasitas staf telah distrategikan. Kemahiran pertama yang harus ditingkatkan adalah Bahasa Inggris. Seluruh staf yang membutuhkan pelatihan Bahasa Inggris harus didorong untuk mengambil kursus intensif bahasa Inggris. Kemahiran kedua adalah menulis. Setiap staf yang ditugaskan bertanggung jawab atas suatu program harus menghasilkan tulisan setiap bulan. Anggota staf juga didorong untuk menyiapkan catatan tertulis sebelum masing-masing rapat team dan didistribusikan diantara anggota team.

Di bawah ini ringkasan proposal program bagi tahun 2007.

1. Riset dan Terbitan

a. Kegiatan-kegiatan riset

- Kertas kerja mengenai Hutang, MDGs dan reformasi sektor keamanan.
- Riset mengenai masalah-masalah sistem penganggaran dalam sektor keamanan
- Riset mengenai pengendalian masyarakat
- Riset mengenai perjanjian integritas dan perjanjian anti suap
- Pemantauan implementasi kesepakatan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik.
- Riset mengenai struktur hutang Indonesia (hutang luar negeri dan dalam negeri)
- Riset mengenai proyek-proyek ODA Jepang
- Riset mengenai hutang-hutang haram

- Riset mengenai audit hutang dan kantor manajemen hutang sebagai dasar-dasar bagi advokasi mengenai peraturan tentang hutang-hutang luar negeri
- Riset mengenai pencapaian MDGs bagi laporan tahunan bayangan
- Riset mengenai MDGs yang berkaitan dengan pengimplementasian kesepakatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

b. Publikasi dan Dokumentasi

- Terbitan hasil riset-riset dalam bentuk buku dan sebagai kertas kerja.
- Terbitan buku-buku dalam bentuk populer bagi pendidikan masyarakat umum: 6 buku termasuk ADB Toolkit dan Grassroot Guide to IMF and World Bank
- Peningkatan situs internet
- Peningkatan perpustakaan

2. Lobby

a. Supremasi Sipil

- Melobby parlemen berkaitan dengan anggaran militer, bisnis militer dan akuisisi militer
- Melobby Menteri Pertahanan berkaitan dengan anggaran militer, bisnis militer dan akuisisi militer
- Melobby parlemen bagi revisi undang-undang mengenai Kepolisian
- Melobby pemerintah bagi revisi undang-undang mengenai Kepolisian
- Melobby Uni Eropa dan diskusi dengan Uni Eropa mengenai makalah kebijakan bagi mekanisme anggaran untuk sektor keamanan
- Melobby ASEAN dan diskusi dengan Sekretariat ASEAN mengenai makalah kebijakan bagi mekanisme anggaran untuk sektor keamanan
- Melobby AS dan Jepang mengenai kerjasama militer
- Menghadiri Pertemuan Tahunan Dewan Hak Azasi Manusia

b. Isu Hutang

- Pendistribusian makalah posisi INFID mengenai hutang-hutang haram dan pemotongan hutang pada negara-negara kreditor.
- Pendistribusian makalah posisi INFID pada para anggota parlemen
- Mengunjungi Jerman untuk melobby pemotongan hutang dan debt swap
- Melobby kunjungan ke negara-negara Skandinavia, terutama Norwegia
- Melobby secara intensif di parlemen
- Berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Development Assistance Commite (DAC) OECD
- Berpartisipasi dalam Konferensi Pendanaan bagi Pembangunan +5 (Financing for Development +5)
- Berpartisipasi dalam Forum Sosial Dunia
- Berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan dan Pertemuan Musim Semi Bank Dunia dan IMF
- Berpartisipasi dalam Pertemuan Paralel Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil dengan Pertemuan G8 di Jerman
- Berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan ADB
- Berpartisipasi dalam konferensi LSM Asia mengenai ADB

c. Kemiskinan dan MDGs

- Pertemuan teratur dengan para anggota parlemen mengenai pengawasan parlementer atas MDGs
- Pertemuan teratur (rapat koordinasi) dengan Pemerintah Indonesia mengenai pencapaian MDGs
- Berpartisipasi dalam Konferensi Pendanaan bagi Pembangunan +5 (Financing for Development +5)
- Berpartisipasi dalam Forum Sosial Dunia
- Berpartisipasi dalam Pertemuan Paralel Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil dengan Pertemuan G8 di Jerman
- Berpartisipasi dalam Konferensi Pencapaian MDGs Jangka Menengah di New York
- Berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF
- Berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan ADB
- Melobby Eropa, AS, Kanada dan Jepang
- Melobby PBB menggunakan mekanisme PBB

3. Networking

a. Supremasi Sipil

- Pertemuan teratur dengan jejaring nasional mengenai anggaran militer, bisnis militer, dan akuisisi militer
- Pertemuan-pertemuan teratur mengenai pemantauan pengimplementasian perjanjian integritas dan prinsip-prinsip anti penyuapan
- Pertemuan pakar mengenai Reformasi Sektor Keamanan (militer dan polisi) di Brussels
- Memfasilitasi para anggota untuk melakukan advokasi di PBB
- Pelatihan-pelatihan SSR
- Pertemuan tahunan para partner INFID di Eropa
- Berbagi informasi dan pertukaran kunjungan pada SSR
- Mengunjungi para anggota INFID pada tingkat regional
- Memelihara jejaring di Eropa

b. Isu Hutang

- Berbagi informasi dengan jejaring-jejaring nasional, regional dan internasional
- Berpartisipasi dalam jejaring-jejaring di Eropa
- Berpartisipasi dalam pertemuan tahunan Eurodad
- Pertemuan tahunan para partner INFID di Eropa
- Berpartisipasi dalam pertemuan tahunan Forum LSM mengenai ADB
- Berbagi informasi dengan jejaring di Jepang dan Korea Selatan

c. Kemiskinan dan MDGs

- Berpartisipasi dalam pertemuan Forum LSM mengenai ADB
- Berpartisipasi dalam pertemuan tahunan EURODAD
- Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan jejaring di Eropa
- Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan regional GCAP

- Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan internasional GCAP
- Pertemuan-pertemuan teratur dengan jejaring MDGs di Indonesia
- Berpartisipasi dalam pertemuan tahunan jejaring INFID di Eropa
- Memfasilitasi para partisipan untuk melakukan advokasi kepada PBB
- Berbagi informasi dengan jejaring di Eropa
- Berbagi informasi dengan jejaring di Jepang dan Korea Selatan

4. Kampanye Publik

a. Supremasi Sipil

- Pendistribusian materi kampanye melalui situs internet dan secara tercetak mengenai anggaran militer, bisnis militer, dan akuisisi militer dalam bahasa Inggris dan Indonesia
- Seminar mengenai Undang-Undang Kepolisian
- Pendidikan masyarakat mengenai pemantauan pengimplementasian perjanjian integritas dan prinsip-prinsip anti penyuaipan
- Diskusi-diskusi siaran langsung di radio-radio mengenai anggaran militer, bisnis militer dan akuisisi militer
- Penulisan artikel-artikel di koran-koran mengenai anggaran militer, bisnis militer dan akuisisi milite
- Kampanye media melalui penulisan artikel-artikel di koran-koran mengenai undang-undang kepolisian
- Pembicaraan siaran langsung di radio mengenai undang-undang kepolisian
- Kampanye mengenai pemantauan pengimplementasian perjanjian integritas dan prinsip-prinsip anti penyuaipan
- Lokakarya mengenai HAM di daerah-daerah konflik (Papua)
- Lokakarya mengenai keamanan manusia (di Sulawesi Tengah)
- Pemantauan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral

b. Isu Hutang

- Penyebaran materi kampanye melalui situs internet dan secara tercetak mengenai struktur hutang Indonesia dalam bahasa Inggris dan Indonesia
- Kampanye media melalui pembicaraan dalam siaran langsung di radio-radio mengenai beban hutang Indonesia
- Lokakarya mengenai struktur hutang Indonesia dan Audit Hutang
- Seminar mengenai ODA Jepang di Indonesia
- Seminar mengenai Program Pengembangan Kecamatan/Kecamatan Development Program (KDP) di NTT (Kupang)
- Diskusi meja bundar mengenai debt swap, menyinggung masalah-masalah praktis
- Kampanye media dengan penulisan artikel-artikel untuk diterbitkan di koran-koran mengenai beban hutang Indonesia
- Pemantauan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral berkaitan dengan hutang dan bantuan.

c. Kemiskinan dan MDGs

- Lokakarya mengenai ODA Jepang dan Korea
- Penyebaran materi kampanye melalui situs internet dan secara tercetak mengenai kemiskinan dan MDGs dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- Kampanye media melalui siaran langsung pembicaraan di radio mengenai kemiskinan dan MDGs di Indonesia
- Kampanye media melalui acara bincang-bincang di televisi mengenai kemiskinan dan MDGs di Indonesia
- Kampanye media melalui penulisan artikel-artikel di koran-koran mengenai kemiskinan dan MDGs di Indonesia
- Penyebaran informasi mengenai pencapaian MDGs Indonesia di Eropa, Jepang, AS-Kanada, Australia-Selandia Baru
- Pemantauan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral

5. Pengembangan Institusional

a. Administrasi Kesahan/Legalitas

- Penyiapan akte notaries
- Pensahan Peraturan INFID
- Pencatatan/pendaftar organisasi pada Pemerintah Indonesia
- Administrasi legalitas
- Penyebaran/diseminasi ke para anggota
- Layanan para Anggota (pangkalan data, pengumpulan masukan/ mekanisme kesesuaian dari para anggota)

b. Pengembangan Kebijakan (Review difokuskan pada strategi advokasi INFID)

- Mereview pencapaian advokasi
- Merancang strategi advokasi secara terperinci
- Menentukan infrastruktur advokasi
- Implementasi
- Evaluasi

c. Mobilisasi Sumber

- Pengumpulan dana
- Penyewaan Kantor
- Pelaporan dan komunikasi dengan para donor
- Konsolidasi INFID (pengaturan partisipan bagi Advokasi Internasional)

d. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- PME berkala per kwartal
- Pengembangan standar PME
- Pemeriksaan Keuangan
- Laporan Keuangan dan Naratif
- Evaluasi Tahunan
- Rencana kerja Tahunan

e. SOP

- Review SOP
- Pemberian persetujuan Dewan bagi SOP

f. Laporan-laporan Publik:

- Pencetakan laporan-laporan publik
- Konferensi-konferensi Pers
- Pemantauan liputan media atas kegiatan-kegiatan INFID

g. Sistem Manajemen Informasi Korporat

h. Popularisasi Institusional

- Pencetakan brosur (brosur-brosur institusional)
- Newsletter

i. Rapat-rapat Organisasional

- Rapat Dewan Pengurus
- Rapat Dewan Pengurus Indonesia
- Rapat Dewan Pengurus Jakarta
- Rapat Dewan Eksekutif
- Rapat Internal Sekretariat (Jakarta, LO)
 - Rapat team manajemen
 - Rapat staf
 - Rapat Divisi
- Rapat Anggauta INFID

j. Akuisisi & Pemeliharaan Peralatan Kantor

k. Pengembangan SDM

- Restrukturisasi Sekretariat INFID: Kepala Divisi Riset dan Publikasi, Koordinator Kampanye Hutang, Petugas Layanan Partisipan, (RELAWAN)
- Perekrutan staf baru
- Evaluasi Tahunan atas Kinerja Staf
- Reformulasi sistem remunerasi
- Magang
- Kursus-kursus dan Pelatihan

XII. CATATAN AKHIR:

INFID telah mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program tahun 2006 sebagaimana telah direncanakan. Pada level nasional INFID telah dapat memelihara posisinya berkaitan dengan pemerintah pusat dan perwakilan-perwakilan Institusi Keuangan Internasional dan CGI. Pertemuan-pertemuan dengan pemerintah, Bank Dunia, ADB dan IMF serta para perwakilan anggota-anggota CGI pada level nasional telah terpelihara dan telah ditingkatkan.

Pada level internasional, partisipasi INFID terbatas hanya sebagai partisipan dalam forum internasional seperti pertemuan ADB, Pertemuan Musim Semi Bank Dunia/IMF dan Forum LSM ADB. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura, INFID seharusnya menyelenggarakan dua seminar bersama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengenai Hutang Haram dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Kedua seminar ini dibatalkan karena pelarangan staf INFID untuk memasuki Singapura oleh pemerintah Singapura.

Beberapa pelajaran penting dari tahun 2006:

1. Peranserta para partisipan INFID telah meningkatkan kegiatan-kegiatan advokasi INFID. Para partisipan pada level regional secara aktif mengingatkan pemerintah-pemerintah lokal dalam menangani proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri. Hal ini dimungkinkan karena adanya komunikasi dan diseminasi informasi yang telah ditingkatkan antara sekretariat dan para partisipan. Di masa depan, riset dan kampanye-kampanye INFID akan melibatkan para partner lokal.
2. Kerja team/teamwork di sekretariat INFID: salah satu hambatan di Sekretariat adalah setiap staf program telah terbiasa bekerja sendiri. Jarang terdapat kesempatan-kesempatan untuk berbagi diantara staf bagi isu-isu penting. Teamwork dapat terbentuk bila berbagi informasi penting diinstitutionalkan dan kegiatan-kegiatan dijadikan tanggungjawab bersama.
3. Reputasi INFID berkaitan dengan pemerintah dan badan-badan multilateral didasari pada kualitas informasi dan argumentasi. INFID harus meningkatkan kualitas riset dan kertas kerjanya.
4. Keterlibatan langsung para anggota Dewan dengan keahlian dan latar belakang khusus dalam advokasi perlu diperluas. Ciri internasional INFID tidak hanya karena INFID terlibat dalam advokasi internasional tetapi juga karena anggota Dewan internasionalnya yang mempunyai reputasi, pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.
5. Struktur Sekretariat INFID harus direview dan ditata ulang supaya dapat menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik, dan hal tersebut dapat memungkinkan para anggota untuk berperan serta secara aktif dalam program-program INFID.
6. Kapasitas staf INFID harus ditingkatkan, dimulai dari kemahiran substansial seperti Bahasa Inggris dan penulisan makalah dengan kualitas yang baik.

Pada tahun 2006 INFID mendapatkan kembali reputasinya yang berkaitan dengan Pemerintah Indonesia, parlemen dan badan-badan multilateral. Hal ini merupakan tantangan baru bagi INFID, karena akan terdapat lebih banyak tuntutan dari para anggota dan dari pemerintah serta badan-badan multilateral sebagai partner-partner yang berharga dalam dialog-dialog kebijakan. Dengan struktur baru dalam sekretariat,

dengan para anggota Dewan yang proaktif dan anggota-anggota aktif INFID, harapan-harapan ini dapat terwujud.

LAMPIRAN:

1. Laporan Keuangan
2. Laporan dari IPF
3. Tanggapan atas Evaluasi Eksternal

PERNYATAAN DAN LIPUTAN MEDIA

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
Jan				
1.	INFID New Year Notes: Year 2006, Will be no Poverty Tackling Without Debt Cancellation!!! <i>Catatan Awal Tahun INFID: Tahun 2006, Tak ada pengurangan Kemiskinan Tanpa penghapusan Utang</i>	Kompas, Detik Com, Tempo Interaktif	Chris Wangkay, Dian, Wahyu Susilo, Nawawi	Statement January 12
2.	Government Should Analyze CGI Benefit <i>Pemerintah Harus Kaji Manfaat CGI</i>	Tempo Interaktif, Media Indonesia, Suara Pembaharuan, Investor Daily	Dian Kartika Sari, Chris Wangkay	Statement January 13
3.	'Ineffective Debt-Swap' <i>'Debt Swap tidak Efektif'</i>	Bisnis Indonesia	Dian Kartika Sari, Chris Wangkay	Comment January 14
4.	Government's Inconsistency to Reduce Debt <i>Pemerintah Tidak Konsisten Kurangi Utang</i>	Media Indonesia	Dian Kartika Sari	Statement January 16
5.	Wanted: One Door Policy in Debt Management <i>Perlu Kebijakan satu Pintu dalam Pengelolaan Utang</i>	Detik.Com, Media Indonesia	Dian Kartika Sari	Comment January 16
6.	Take The Debt Swap Offer to The Negotiation for Debt Cancellation <i>Tindak lanjuti Tawaran Debt Swap ke Perundingan Penghapusan Utang</i>	Detik.Com, Suara Pembaharuan Bisnis Indonesia	Dian Kartika Sari	Statement January 20
7.	INFID urged the governments of Germany, Italy, and UK to open all information regarding the debt swap agreement being offered to the Indonesian government <i>INFID mendesak pemerintah Jerman, Italia,</i>	Suara Pembaharuan, Suara Merdeka Cyber	Dian Kartika Sari	Statement January 24

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
	<i>dan Inggris membuka seluruh informasi dan perjanjian pertukaran utang/debt swap</i>			
8.	Audit and Revise Public-Private Partnership on Drinking Water services <i>Audit dan Revisi Kerjasama Operasi (KSO) Air Minum di Jakarta</i>	Kompas, Bisnis Indonesia, Koran Tempo	KruHA, INFID, YLKI, LBH Jakarta, DPP Serikat Pekerja PDAM, KOMPARTA, IGJ, GAPRI dan FPPI,	Joint Statement January 25
9.	Indonesia Needs More Progressive Debt Relief than Debt Swap <i>Indonesia membutuhkan Penghapusan Utang dari pada debt swap-Jerman</i>	Bisnis Indonesia, Koran Tempo	Dian Kartika Sari	Statement January 30
10.	INFID: BUMN (State Company) Corruption Issue to Re-Draw the Political Party Lot <i>INFID: Isu Korupsi BUMN untuk Kocok Ulang Jatah Partai Politik</i>	Tempo Interaktif	Dian Kartika Sari	Statement January 30
11.	INFID: Japanese Debt Should Limited <i>INFID: Utang Jepang Harus Dibatasi</i>	Tempo Interaktif	Dian Kartika Sari	Statement January 31
Feb				
1.	Securing participation of civil society and leading role of the United Nations in Poverty Eradication <i>Menjamin peran Serta Masyarakat Sipil dan Peran Utama PBB dalam mengurangi Kemiskinan</i>	United Nation - 44 th Session of the Commission for Social Development	Rizal Malik Suryani.A o/b INFID	Statement February
2.	The Girl-child's Rights: the right to education, access to health services and protection in the work place <i>Hak Anak Perempuan: Hak atas pendidikan, akses layanan kesehatan dan perlindungan di</i>	The 50th session of the Commission on the Status of Women (CSW) UN New York,	Antarini, YPHA o/b INFID	Statement February 27

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
	<i>tempat Kerja)</i>			
3.	Women Health <i>Kesehatan Perempuan</i>	The 50th session CSW UN New York	Atas Hendartini Women's Health Foundation o/b INFID	Statement February 27
4.	Women Participation On Decision Making In Indonesia <i>Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia</i>	The 50th session CSW UN New York	Kartini KPI o/b INFID	Statement February 27
March				
1.	Again, Many Countries Angry with Abe <i>Lagi, Berbagai Negara Berang Pada Abe</i>	Kompas	Jaringan Advokasi Jugun Ianfu, Kalyanamitra, INFID	Joint Statement March 7
2.	NGO Coalition Urges Government to Have Intensive Dialogue <i>Koalisi ORNOP Desak Pemerintah Lakukan Dialog Intensif</i>	Kompas	Demos, HRWG, Kontras, Imparsial, INFID	Joint Statement March 17
3.	Report : International Advocacy on Women Right in the CSW 50 <i>Advokasi Internasional Hak-hak Perempuan</i>	Kompas, Metro TV, SCTV, Media Indonesia	The GOI Delegations and INFID Delegations	Joint Report March 23
4.	Item 6: Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and All Forms of Discrimination	62nd CHR-UN Geneva	by Gandi and HRWG	Written Statement
5.	Item 7: Right To Development	62nd CHR-UN Geneva	by WALHI-HRWG	Written Statement
6.	Item 9: ACEH	62nd CHR-UN Geneva	by KontraS Aceh and HRWG	Written Statement
7.	Item 10 : Indonesia Ratified International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and Violated it at the same time	62nd CHR-UN Geneva	- by INFID	Written Statement
8.	Item 11 b :	62nd CHR-UN	- by KontraS and	Written

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
	Disappearances and Summary Executions	Geneva	HRWG	Statement
9.	Item 11 c: HR Violation on the Freedom of Expression From Omission to Commission	62nd CHR-UN Geneva	Voice of Human Right and HRWG	Written Statement
10.	Item 11 d : Independence of the Judiciary	62nd CHR-UN Geneva	by Elsam and HRWG	Written Statement
11.	Item 11 e : Religious Intolerance	62nd CHR-UN Geneva	by PGI and HRWG	Written Statement
12.	Item 12: Integration of the women human rights and the gender perspective	62nd CHR-UN Geneva	by Women Groups	Written Statement
13.	Item 13 : Rights of the child	62nd CHR-UN Geneva	by Children's Human Rights Foundation and HRWG	Written Statement
14.	Item 14a: Protection for IDPs should become one of the indicators of Poverty Reduction	62nd CHR-UN Geneva	by INFID- HRWG	Written Statement
15.	Item 14: Indonesian Migrant Workers, a never ending Suffering	62nd CHR-UN Geneva	by Migrant Care	Written Statement
16.	Item 15: Indigenous Issues	62nd CHR-UN Geneva	by: AMAN & HRWG	Written Statement
17.	Item 17 b: Human Rights Defenders	62nd CHR-UN Geneva	by Imparsial & HRWG	Written Statement
May				
1.	May Day Pobia <i>Fobia Hari Buruh</i>	Kompas	Wahyu Susilo	Article May 1
2.	Debt is A Political Tool <i>Utang adalah Alat Politik</i>	New Perspektif-Wimar Wotoelar	Dian Kartika Sari	Talk Show May 1
3.	Fairness and Debt Reduction Rate <i>Rasa keadilan dan Rasio Pengurangan Utang</i>	Media	Don K Marut	Statement May 10
4.	Indonesia Pushed to Improve Human Right Condition in The Country	Kompas	HRWG, Kontras, PBHI, INFID	Joint Statement May 11

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
	<i>Indonesia Dituntut Perbaiki Kondisi HAM Dalam Negeri</i>			
5.	There is no need to Create new Loan in the Next CGI Meeting – Negotiate Debt Cancellation, Immediately-Respond on The GoI and Parliament Meeting <i>Tidak Perlu Utang Baru dalam Pertemuan CGI mendatang-Lakukan Negosiasi Penghapusan Utang, Segera – Tanggapan terhadap Rapat Pemerintah Indonesia dan DPR</i>	Media	Don K Marut	Statement May 15
6.	The Government of Indonesia Does Not Have To repay All of Its Debt to IMF <i>Pemerintah Indonesia tidak harus membayar semua utangnya kepada IMF</i>	Media	Dian Kartika Sari	Statement May 24
7.	Cancel Dictator Debts- Cancel Illegitimate Debts!	Kompas	Reality of Aid-Asia Pacific, IBON Foundation, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) and Pacific Asia Resource Center (PARC), Norwegian Church Aid (NCA), European Network on Debt and Development (Eurodad), African Network on Debt and Development (Afrodad), Christian Conference of Asia (CCA) and Kairos-Canada.	Joint Statement : International conference on Illegitimate Debt 27-29 May
June				
1.	To overcome Disaster and Poverty Indonesia needs debt cancellation, not new	Circulate to INFID Network	Don K Marut	Statement June 2

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
	debts! (Yogya) <i>Indonesia membutuhkan penghapusan utang untuk atasi bencana, bukan utang baru</i>			
2.	Indonesia: 14 Years In The Clasp of CGI: Oppressed And Impoverished	Circulate in CGI Meeting	Don K Marut –o/b INFID Members	Position paper June 10
3.	Indonesia : 14 Years In The Clasp of CGI Oppressed and Impoverished <i>Indonesia: 14 Tahun Dalam Cengkraman CGI, Tertindas dan Dimiskinkan</i>	Circulate and read at CGI Meeting	Don K Marut	Statement June 14
4.	About Foreign Debt and CGI <i>Menyoal Utang Luar Negeri dan CGI</i>	Kompas	Wahyu Susilo	Article June 14
5.	Inconsistency of The GOI to reduce Debt burden reduction <i>Pemerintah Tidak Konsisten dalam Upaya Mengurangi Beban Utang</i>	Detik.Com	Dian Kartika Sari	Statement June 15
6.	No Reform For Security Sector Without Cancellation Of Military Business Practices <i>Tidak Ada Reformasi Sektor Pertahanan Tanpa Penghapusan Praktek Bisnis Militer</i>	Media	Dian Kartika sari, o/b Indonesian NGO	Joint Statement June 21
July				
1.	Debt, Post-Disaster Trap <i>Utang, Perangkap Pasca Bencana</i>		Wahyu Susilo	Article
2.	Government is Urged to Make Disaster Risk Map <i>Pemerintah Didesak Buat Peta Daerah Rawan</i>	Kompas	WALHI, Contrahaz, HRWG, INFID, YLBHI, KAU	Joint Statement July 20

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
	<i>Bencana</i>			
3.	State Secrecy Act Draft; A Threat to Democracy <i>RUU Rahasia Negara; Ancaman Bagi Demokrasi</i>	Media	Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil	Joint Statement July 22
4.	Why is it Important for the NGOs in Indonesia to conduct an Intervene in the High Level Dialogue on International Migration and Development	UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, Jakarta	Wahyu Susilo	Article July 24
August				
1.	Government and National Parliament Should Change Budgeting Scheme <i>Pemerintah dan DPR harus Ubah Pola APBN</i>	Sinar harapan	Wahyu Susilo	Comment August 16
2.	Corruption in Infrastructure Projects <i>Korupsi Proyek Infrastruktur</i>	Metro TV	Dian Kartika, Ketua Komisi XI DPR, Menteri Pekerjaan Umum	Economic Dialogue
3.	Defense Budget: BRR Threats Military Reformation and Breaks Defense System <i>Anggaran Pertahanan Keamanan: BRR Mengancam Reformasi Militer dan Merusak Sistem Pertahanan</i>	Media	Nawawi Bahruddin-Aceh Working Group	Statement August 16
4.	On the Evaluation of the Yearly Projection in the Helsinki MOU: An Alternative Solution to Refuse Aceh Government Act <i>Tentang Evaluasi Proyeksi Setahun MoU Helsinki : Solusi Alternatif Atas Penolakan UU Pemerintahan Aceh</i>	Media	Aceh Working Group	Joint statement August 16
5.	2007 Budget Draft is IDR 33.1 Trillion Deficit <i>RAPBN 2007 Defisit Rp</i>	Media	Komite Bersama Anti Pemiskinan (KBAP), Wahyu Susilo	Comment August 16

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
	<i>33,1 Triliun</i>			
Sept				
1.	See INFID Statement-Media –International People Forum			
2.	Don't Create Debt if can't Pay <i>Jangan Berhutang Jika Sulit Membayar</i>	Trust	Don K Marut	Interview September 24
3.	World Bank and IMF Reformation are Illusions <i>Reformasi Bank Dunia dan IMF hanya Ilusi</i>	Media	Chris Wangkay, Don K Marut, Kunibert	Statement September 20
Oct				
1.	Paying the IMF Debt: To be Followed by Changes in Indonesian Policies <i>Pelunasan Utang IMF: Harus Diikuti Perubahan Kebijakan Indonesia</i>	Media	Don K Marut	Statement October 6
2.	INFID Regrets IMF Debt Settlement without Negotiation <i>INFID Sayangkan Pelunasan Utang ke IMF Tanpa Negosiasi Dulu</i>	Detik.com	Don K Marut	Statement October 7
3.	IMF Debts: No Need to Pay them All <i>Utang IMF Tak Perlu dibayar semua</i>	Media	Don K. Marut	Comment October 10
4.	Indonesia Fails in Poverty Eradication Policy, MDG's Achievement is just a Dream (World's Poverty Day, October 17) <i>Indonesia Gagal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Pencapaian MDGs Hanya Sebatas Mimpi (Hari kemiskinan Sedunia 17 Oct)</i>	Kompas, Suara Pembaharuan Daily, Cyber News	INFID- Fatayat Nahdlatul Ulama, Migrant Care, Asosiasi Serikat, Pekerja (Aspek) Indonesia, E-net for Justice, Urban Poor Consortium, dan Gapri	Joint Statement 16 – 18 Oct

Bulan & No.	Judul / Topik	Nama Media	Pegawai/Personel INFID	Bentuk: Pernyataan/ Komentar/ Artikel
5.	Government has no systematical efforts and is weak in debt diplomacy <i>Pemerintah Tak punya upaya sistematis dan lemah dalam diplomasi utang</i>	Suara Pembaharuan Daily	Dian Kartika Sari	Comment October 20
Nov				
1.	Poverty in Indonesia <i>Kemiskinan di Indonesia</i>	Kompas	Wahyu Susilo	Article November 9
2.	Safe Water Means Development for all Indonesians	The Jakarta Post	Wahyu Susilo	Article November 9
4.	NGOs Present Bleak RI Report to European Partners	The Jakarta Post	Don K Marut	Statement November 21
5.	Launching a Month Human Right Campaign	Radio 68 H	Wahyu, Migran Care, Gappri	Talk Show November 23

